TIMOR
TIMUR

DULU & SEKARANG

Rc

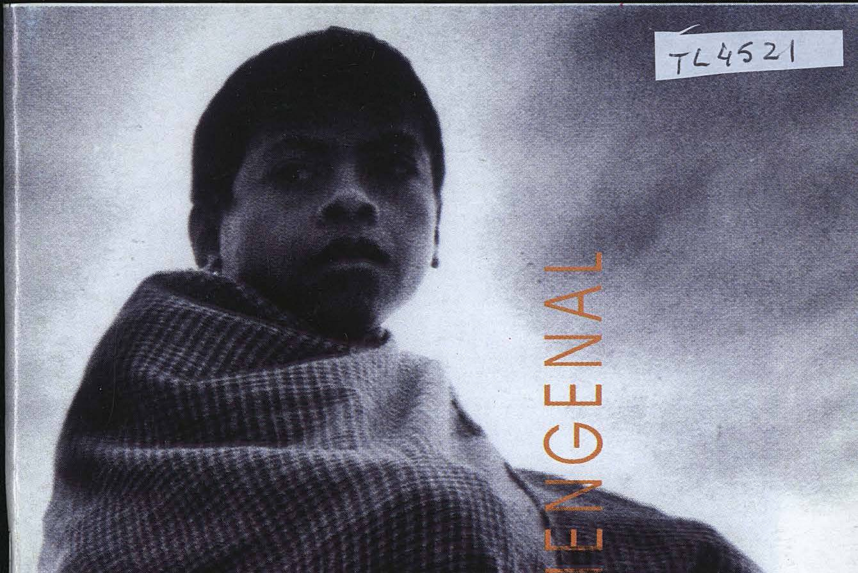

ENGENAL

TL4521

MENGENAL

Timor Timur

DULU & SEKARANG

MENGENAL
Timor Timur
DULU & SEKARANG

Penulis & Editor:

Roy Pakpahan

SOLIDAMOR
Solidaritas Indonesia untuk Perdamaian Timor Timur
Jakarta, September 1998

Mengenal Timor Timur; Dulu dan Sekarang

Penulis dan Editor : Roy Pakpahan
Perwajahan : Airlambang
Cover : Cipta Nugraha
Photo Cover : Steve Cox
Generations of Resistance; East Timor

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak buku ini baik sebagian
atau seluruhnya dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

SOLIDAMOR, sebuah lembaga yang menghimpun unsur rakyat Indonesia dari berbagai profesi dan latar belakang yang berbeda, tetapi peduli pada persoalan dan masa depan rakyat Timor Timur.

Cetakan Kedua, September 1998

PRAKATA PENERBIT

TIMOR TIMUR TELAH MENJADI SUATU METAfora bagi bencana yang beranak cucu. Serbuan besar tentara Indonesia ke Timor Timur, 7 Desember 1975 dan pendudukan militer yang terus berlangsung di sana, merupakan suatu bencana kemanusiaan. Rekayasa Integrasi dengan Indonesia telah mengorbankan ratusan ribu jiwa yang melayang dan ratusan ribu jiwa yang lain menderita. Kebanyakan korban itu tak bersenjata, terutama rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa. Selain itu juga tewas ribuan prajurit Indonesia. Tragedi itu merupakan bencana politik yang merugikan semua pihak, pihak Timor Timur maupun pihak Indonesia.

Ratusan miliar rupiah yang dibuang Indonesia untuk mempertahankan operasi militer dan membiayai ongkos politik masalah Timor Timur. Politik integrasi ternyata tidak didukung oleh rakyat Timor Timur. Sebab pasca integrasi perlawanan gerilya dan pemuda/i Timor Timur masih terus berlangsung hingga kini. Akibatnya korban pun terus berjatuhan dan Timor Timur terus menjadi sorotan dunia internasional dan tetap menjadi bagian dari agenda PBB. Masalah Timor Timur semakin jadi sorotan setelah lebih dari 271 orang Timor Timur tewas diterjang peluru militer Indonesia dan 250 orang lainnya hilang dalam tragedi berdarah, Santa Cruz, 12 November 1991.

Semua bencana itu membuat kehidupan rakyat Timor Timur sangat akrab dengan penderitaan dan tidak pernah merasa merdeka dalam segala hal. Setelah empat setengah abad dijajah Portugis dan selanjutnya 23 tahun di bawah kendali Indonesia, membuat rakyat Timor Timur tidak bisa bebas dan mandiri. Banyak penderitaan dan beragam persoalan yang dihadapi rakyat Timor Timur sebelum dan sesudah integrasi. Mulai dari persoalan pelanggaran hak asasi manusia sampai persoalan untuk menentukan nasib sendiri. Namun semua persoalan itu tidak diketahui secara luas oleh rakyat banyak, termasuk rakyat Indonesia.

Hal itu bisa terjadi karena tidak adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan mendapatkan informasi mengenai fakta yang sebenarnya terjadi di Timor Timur. Bagaimana masyarakat luas dan dunia internasional bisa menentukan pendapatnya dengan tepat jika berita-berita mengenai Timor Timur diblokade secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. Apalagi media massa Indonesia yang terpaksa memberitakan secara sepihak masalah Timor Timur karena ditekan aparat Indonesia. Akibatnya prinsip universal pemberitaan media, *cover both sides,* tidak pernah dijalankan media massa Indonesia dalam pemberitaan soal Timor Timur. Sehingga kepentingan rakyat Timor Timur dirugikan dan sulit bagi kebanyakan orang Indonesia untuk mengetahui informasi tentang Timor Timur secara lengkap dan obyektif.

Untuk mengisi kekurangan dan menyeimbangkan pemberitaan informasi mengenai Timor Timur maka Solidaritas Indonesia Untuk Perdamaian Timor Timur (SOLIDAMOR) membuat buku saku ini. Buku ini terutama ditujukan kepada kalangan pembaca yang masih awam dan baru saja tertarik mempelajari dan mengerti persoalan Timor Timur yang sebenarnya. Meskipun buku ini relatif tipis namun cukup padat dengan informasi yang lengkap dan aktual. Selain itu buku ini ingin memberikan gambaran bahwa rakyat Timor Timur belum pernah diberikan kesempatan secara bebas dan terbuka untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri.

Karena itu dengan semangat reformasi dan tumbangnya rejim Soeharto, sangatlah tepat jika rakyat Timor Timur juga bisa memetik hasil reformasi. Kesempatan untuk menentukan nasib sendiri itu adalah sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945 yaitu: "*Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena itu setiap bentuk penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan*".

Sekaranglah memang waktu yang tepat bagi rakyat Timor Timur untuk menyatakan aspirasi dan menyuarakan hati nuraninya. Adanya buku kecil ini yang menyuarakan aspirasi itu adalah suatu harapan agar para pembaca bisa lebih memahami dan mengerti masalah Timor Timur yang sesungguhnya. *Patria ou Morte! A Luta Continua!*

Jakarta, 1 Juli 1998

Pengurus SOLIDAMOR

DAFTAR ISI

- Prakata Penerbit v
- Daftar Isi ix

I. Sejarah & Latar Belakang Timor Timur 1
II. Timor Timur Pasca Revolusi Bunga Portugal 6
III. Timor Timur Pasca Integrasi Ke Indonesia 13
IV. Politik Isolasi Timor Timur & Tragedi Santa Cruz 21
V. Xanana Gusmao Ditangkap & Perjuangan Fretilin 25
VI. Masalah Sosial Ekonomi, Politik Transmigrasi, Perempuan & KB 31
VII. Persepsi Dunia Internasional & Peran PBB 37
V III. Kunjungan Paus Paulus, Hadiah Nobel & Dukungan Organisasi Hak Asasi Manusia & LSM 43
IX. Masa Depan Timor Timur Pasca Rejim Soeharto 49
X. Xanana Gusmao, Ramos Horta & Portugal Menolak Otonomi 55

- KEPUSTAKAAN 59

I

Sejarah & Latar Belakang Timor Timur

PULAU TIMOR YANG SEBAGIAN MENCAKUP Timor Timur adalah sebuah pulau yang meliputi wilayah seluas 32.200 km2. Pulau ini terletak di kawasan di mana Asia bertemu dengan Oseania yang terbentang luas di wilayah Asia-Pasifik. Tepatnya pulau ini berjarak 600 km dari Australia dan 2100 km dari Jakarta. Pulau Timor mempunyai daerah yang tidak datar dan bergunung-gunung. Dikate-gorikan secara geografis sebagai daerah tidak vulkanis, pulau ini terkenal dengan kayu cendana putih yang bernilai tinggi.

Sebagai suatu bejana peleburan dari beraneka ragam suku, wilayah Timor Timur terdiri dari tanah daratan seluas 14.600 km2. Penduduknya terdiri dari dua golongan ras yaitu Austronesia dan Papua. Golongan Austronesia (kira-kira 75% dari jumlah penduduk) terdiri dari suku Belun, dan Ueihalu yang bahasanya beragam seperti: Tetun, Mambai, Teko-dede, Kemak, Galoli, Idate, Lakalei, dll. Suku Belun tinggal di kedua sisi perbatasan Timor Timur dan Timor Barat (NTT). Belun (=kawan) di Timor Barat; Ueihelu di Timor Timur. Sedangkan golongan Papua (kira-kira 25% dari jumlah penduduk) terdiri dari suku Bunak, Makasae dan Fatuluku. Dua suku yang disebut belakangan mendiami ujung Timur dari pulau Timor.

Walaupun dijajah Portugal hampir 450 tahun namun kelompok suku-suku ini masih mempertahankan ciri-ciri budaya, adat dan tradisi, termasuk bahasanya. Selain keragaman tarian dan nyanyian, tercatat ada 16 jenis bahasa etnis daerah dan untuk bahasa pergaulan lingkup ras Austronesia dipakai bahasa Tetun. Ketika bahasa Portugal dijadikan bahasa resmi di Timor Timur, penguasa kolonial tidak melarang penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa kedua. Kehidupan beragama di Timor Timur diawali oleh misi Dominika Portugal sekitar tahun 1556. Awalnya rakyat Timor Timur banyak yang animis, namun setelah kedatangan misi Katolik, sebagian rakyat Timor Timur masuk Katolik.

Para pedagang Cina memelopori hubungan perdagangan dengan penduduk asli Timor sekitar tahun 1400-an. Pada tahun 1515 bangsa Portugis pertama kali menginjakkan kakinya di pulau Timor. Motif kedatangan mereka untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alam seperti kayu cendana. Kehadiran Portugal mulai diusik oleh munculnya kekuatan kolonialis Belanda di wilayah Hindia Nusantara. Belanda berhasil menduduki Solor dan Kupang pada tahun 1657. Letak Portugal yang sangat jauh dari Timor, membuat kontrol mereka terhadap wilayah Timor tidak efektif. Sehingga Belanda dengan mudah mengontrol kekuasaannya di Timor, apalagi setelah invasi Spanyol ke Portugal tahun 1680.

Belanda lalu mendukung pemberontakan Oekussi, pimpinan Raja Manuel da Costa. Untuk tetap menancapkan pengaruhnya di Timor, Portugal menunjuk Antonio Guerreiro sebagai Gubernur Timor dan Solor. Selama pemerintahan gubernur Portugal banyak terjadi pemberontakan raja-raja Timor. Hal itu terjadi karena penerapan pajak yang dipaksakan oleh gubernur kepada para Raja dan penduduknya. Tahun 1768 pecah pemberontakan rakyat di Lifau, yang mengakibatkan Gubernur baru, Antonio Jose Teles, terpaksa mengungsi ke Dili, yang terletak 70 km arah timur Lifau.

Setelah itu terjadi berbagai pemberontakan yaitu di Luca (1782), kerajaan Belo dan Manatuto (1778) dan Maubara da Senobai (1790). Setelah Inggris merebut kepulauan Banda dan Ambon, maka tahun 1799 Inggris mencoba menyerbu Timor namun tidak berhasil. Di masa Gubernur Vitorino da Cunha Gusmao pada tahun 1811, saat itu wilayah Timor Timur dibagi dua wilayah kekuasaan. Raja Motael berkuasa di selatan Dili dan Kepala Pastor di wilayah Manatuto. Ketika Gubernur berikutnya, Jose Joaquin Lopes berkuasa pada tahun 1848, wilayah jajahan Timor meliputi bagian timur pulau Timor dan enam pulau yaitu Flores, Adonara, Solor, Lomblem, Pantar dan Alor. Jose Lopes membuat perjanjian dengan Belanda, dimana 6 pulau tersebut diberikan kepada Belanda dengan bayaran uang sebanyak 200.000 florin.

Belanda masuk ke Flores tahun 1859 dan saat itu mulai masuk para saudagar Arab. Gubernur Timor Timur mulai lagi mendapat pemberontakan raja-raja di Laleia, Darularan, Maubara dan Vemasse. Pemberontakan semakin gen-car ketika tahun 1894 berkuasa Gubernur Celestino da Silva, yang memerintahkan kerja paksa penanaman kopi. Sesudah memadamkan seluruh pemberontakan pada tahun 1908, Celestino menerapkan sistem pajak teratur. Namun setelah Celestino diganti oleh Gubernur Filomeno da Camara, terjadi lagi pemberontakan di Manufahi dan Oekussi pada tahun 1912. Selama Gubernur Portugal berkuasa sejak tahun 1702, struktur politik raja (atau Liurai: penguasa wilayah setempat) sampai ke Chefes de Posto (kepala kecamatan) dan Chefes de Suco (kepala desa) tetap berpengaruh dalam kehidupan tradisional rakyat Timor

Timur.

Walaupun sudah membuat beberapa kali perjanjian, namun persaingan Belanda dan Portugal untuk menguasai konsesi kayu cendana dan hasil bumi lainnya di seluruh wilayah Timor terus berlangsung. Persaingan itu memuncak dan menimbulkan pertikaian, yang akhirnya diselesaikan oleh Mahkamah Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda, tanggal 17 Agustus 1916. Mahkamah itu memutuskan perjanjian Belanda dan Portugal untuk membagi dua wilayah Pulau Timor. Daerah bagian barat menjadi milik Belanda dan bagian dari Hindia Timur Belanda (sekarang wilayah Nusa Tenggara Timur/NTT). Sedangkan daerah bagian Timur yang mencakup kantung kecil Oecussi-Ambeno diberikan kepada Portugal dan diberi nama Timor Portugis (sekarang wilayah Timor Timur).

Setelah itu hampir tiga dekade tidak ada pemberontakan sampai Jepang memulai perang pasifik dan masuk ke Dili pada Februari 1942. Belanda yang dalam perang pasifik berpihak kepada Sekutu, dibantu Australia juga mendarat di Dili pada Desember 1942. Terjadi perselisihan antara kedua negara, yang mengakibatkan Belanda terpaksa mundur ke perbatasan Timor Barat. Kedatangan Jepang membuat kekuasaan Portugis di Timor Timur menurun secara drastis. Memanfaatkan ketidakberdayaan Portugis, masyarakat Fatumean, Fatululic, Fohorem, Tilomar, Maucatar, Suai, Lolotoe, Turiskai dan Maubisse melakukan pemberontakan untuk menolak kolonialisasi Portugal.

Hasil penjajahan Jepang selama tiga tahun di seluruh pulau Timor (1942-1945) sangat merugikan rakyat Timor. Ribuan orang Portugal dan masyarakat Timor meninggal serta rumah mereka dibakar. Setelah kekalahan Jepang dalam perang dunia kedua, Portugal kembali berkuasa di Timor Timur, September 1945. Sejak tahun 1945 sampai

Portugal angkat kaki dari Timor Timur, 1975, hanya terjadi satu kali pemberontakan, tetapi justru dalam skala yang sangat besar. Pemberontakan itu terjadi tahun 1959 yang disebut "*Revolta de* 1959" yang berakhir dengan pembunuhan besar-besaran terhadap pimpinan rakyat di Uatulari, Uatu-carbau dan Viqueque. Sebagian pimpinan rakyat ini dibuang ke Angola, suatu koloni Portugal di Afrika.

Setelah itu keadaan di Timor Timur relatif stabil sampai terjadi revolusi bunga (*Revolucao dos Cravos*) di Portugal, 25 April 1974. Revolusi ini dilakukan Jenderal Spinola yang menggulingkan pemerintahan diktator Marcello Caetano. Spinola memberikan kebebasan kepada koloni-koloni Portugal termasuk Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Program dekolonisasi Portugal juga berlaku terhadap koloninya yang lain yaitu; Angola, Mozambique, Guine Bissau, dll.

Tercatat selama Portugal berkuasa, hanya terdapat satu dokter untuk setiap 27.000 penduduk Timor Timur. Tingkat buta huruf sangat tinggi, yaitu di antara jumlah penduduk 680.000 saat itu, hanya kira-kira 10 persen yang dapat membaca dan menulis bahasa Portugis. Kemudian hanya 0,25% rakyat yang berkesempatan untuk belajar ke sekolah menengah dan tinggi. Selain itu prasarana sangat kurang memadai. Hanya terdapat 30 km jalan beraspal yang tidak bisa menembus wilayah Timor Timur yang berbukit-bukit. Akibatnya petani sulit untuk mengangkut hasil pertaniannya ke pasar dan kehidupan rakyat sangat susah serta perkembangan perekonomian mandeg. Semua data itu menunjukkan Timor Timur adalah koloni Portugal yang paling terbelakang. ❍

II

Timor Timur Pasca Revolusi Bunga Portugal

MENYAMBUT PROGRAM DEKOLONISASI yang dicetuskan Portugal, di Timor Timur awalnya berdiri dua partai politik. Partai *Uniao Democratica de Timor* (UDT) adalah partai yang berhaluan tengah kanan dan partai *Associacao Social Democratica Timorese* (ASDT), yang berhaluan radikal. UDT ingin agar Timor Timur tetap berada di bawah Portugal dengan status federasi dan merdeka sesudah masa peralihan 20 tahun dan menolak integrasi dengan negara asing. UDT yang berdiri tanggal 11 Mei 1974, diketuai Francisco Lopez de Cruz (saat ini Dubes Keliling Indonesia) dengan sekretaris jenderal, Domingos de Oliveira. Mantan Gubernur Timor Timur, Mario Viegas Carrascalao, adalah juga sekretaris politik partai UDT, yang ketika itu juga kepala Jawatan Pertanian dan Kehutanan Timor Timur.

Awalnya pengikut UDT adalah kalangan birokrat dan kepala-kepala suku. Secara finansial partai kuat dibandingkan dengan partai lainnya. Tetapi haluan dan arah partai ini sangat tidak konsisten. Mula-mula menginginkan status federasi dengan transisi 15-20 tahun untuk merdeka. Kemudian berubah menjadi 10 tahun, 5 tahun dan setelah pertemuan Macao, 25-28 Juni 1975, jangka waktu itu menjadi tinggal 3 tahun. Ketidakkonsistenan itu juga terlihat pada awalnya UDT tidak ingin integrasi dengan negara asing, tetapi setelah melancarkan kudeta yang gagal pada tanggal 11 Agustus 1975 kepada kepemimpinan *Fretilin*, malah sebagian pimpinan UDT menjadi motor integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia.[*] UDT pernah berkoalisi dengan Fretilin tetapi diputuskan secara sepihak karena menganggap bahwa koalisi itu hanya menguntungkan Fretilin.

Sementara itu sikap Partai ASDT adalah ingin Timor Timur segera merdeka dari tangan Portugal. Ketua partai ini adalah Francisco Xavier do Amaral dengan wakil ketua, Nicolau Lobato dan Sekjen, Alarico Fernandez. Pendiri lain dari partai ASDT adalah pemenang hadiah Nobel, Jose Ramos Horta, yang saat itu wartawan harian A Voz de Timor. Kemudian ASDT dipimpin oleh lapisan mahasiswa radikal yang baru pulang belajar dari Lisabon, Portugal, pada September 1974. Mereka lalu mengubah ASDT menjadi *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (Fretilin) yang artinya Front Revolusioner untuk Kemerdekaan Timor Timur. Pemimpin Fretilin selain Ramos Horta adalah pemimpin Falintil (sayap militer/gerilyawan Fretilin), Xanana Gusmao, Ma'Huno, Mari Alkatiri, Jose luis Guterres, Filomeno Raixas, Ali Alkatiri, dan lain-lain.[**]

Radikalisme dalam tubuh Fretilin dinyatakan dalam program perubahan kebijakan sosial ekonomi yang lebih progresif dan revolusioner. Program inilah yang dinilai mengancam *status quo* di Timor Portugis, khususnya kepada kelompok tuan tanah yang banyak menguasai tanah pertanian dan perkebunan. Program itu adalah: perampasan atas penguasaan tanah besar, dimasukkannya tanah subur yang tidak ditanami ke dalam suatu sistem koperasi tani, keikutsertaan rakyat Timor Timur dalam setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan untuk orang muda.

---

*. Pada saat kudus UDT (Bp. Fransisco Lopez da Cruz dan Mario Viegas Carrascalao) menandatangani Deklarasi Balibo sebagian besar kader UDT yang ada di Portugal (termasuk sebagian yang melarikan diri dari Dili mengirimkan surat pernyataan sikap partai kepada PBB bahwa kedua tokoh (Fransisco Lopez de Cruz dan Mario Viegas Carrascalao) tidak berwenang mewakili UDT dan mereka telah mengkhianati Program Politik UDT.

**. CCF (Comite Central Fretilin) yang pertama terdiri dari 62 anggota. Sebagian besar dari mereka, 85% telah gugur dalam perjuangan dari 1976 sampai dengan 1979.

Sedangkan partai lainnya adalah Apodeti (*Associacao Popular Democratica Timorese*), yang menginginkan integrasi Timor Timur ke dalam negara Indonesia sebagai daerah otonomi menurut hukum internasional. Pemimpin Apodeti adalah Arnaldo dos Reis de Araujo dan Sekjen, Fernando Osorio Soares, yang juga pernah bergabung dengan partai ASDT. Apodeti sebelumnya dikenal dengan nama *Associa-cao para a Integracao de Timor a Indonesia* (AITI) dan didirikan pada tanggal 27 Mei 1975. Partai ini muncul sesudah UDT dan Fretilin, dan sikap politiknya pro integrasi. Selain itu ada partai *Trabalhista* (partai buruh) dan Kota (*Klibur Oan Timor Asuain*). Tetapi keduanya tidak berpengaruh dan hanya menjadi *underbow* partai UDT.

Proses dekolonisasi Timor Timur dimulai oleh Menteri seberang lautan Portugal, Dr Jose Almeida Santos yang bersama Gubernur Timor Portugis, Lemos Pires, tiba di Dili, Oktober 1974. UDT yang tadinya didukung oleh Gubernur sebelum Lemos, justru tidak mendapat dukungan dari aparat Lemos (Francisco Mota dan Costa Jonatas), yang justru bersimpati kepada Fretilin. Karena Fretilin menginginkan proses dekolonisasi yang cepat dan biaya seminim mungkin, yang sesuai dengan kebijakan pemerintah Portugal. Partai Apodeti tidak disukai oleh aparat Gubernur Lemos karena ingin berintegrasi ke In donesia. Sampai akhir tahun 1974, tidak terlihat langkah kongret dalam proses dekolonisasi. Yang terjadi justru ketiga partai politik aktif melakukan manuver politik untuk menarik massa yang diselingi adanya kekerasan fisik.

Untuk mengakhiri kemelut lalu direncanakan pemungutan suara pada Maret 1975. Tetapi itu tidak pernah terjadi sampai diadakan pertemuan Macao 25-28 Juni 1975, yang tidak mencapai hasil karena diboikot Fretilin. Akibatnya perseteruan di antara partai-partai politik semakin tajam. Lalu bulan Juli 1975 dalam pemilihan lokal, Fretilin meraih kemenangan dengan 55 persen dari jumlah suara. Karena yakin Indonesia tidak akan pernah mengakui kemenangan Fretilin dan terpengaruh provokasi bahwa Fretilin akan merencanakan kudeta, akhirnya UDT melancarkan kudeta. Kudeta itu juga terjadi karena UDT merasa tidak didukung oleh Gubernur Lemos. Jalan pintas kudeta terjadi pada tanggal 11 Agustus 1975, dan UDT berhasil menguasai sebagian besar kota Dili. Kudeta berdarah akibat perang saudara ini menimbulkan korban tewas sekitar 2300 orang.

Ketika itu UDT menahan sejumlah pimpinan Fretilin dan membahas rencana kemerdekaan serta menolak campurtangan Indonesia dan Apodeti. Tetapi kemenangan UDT tidak berlangsung lama karena langsung ada reaksi dari anggota-anggota pribumi tentara Portugal yang bergabung bersama sekitar 9000 orang sayap perlawanan bersenjata Fretilin yang diberi nama *Forcas Armadas de Libertacao National de Timor Leste* (Falintil). Karena terdesak dan kalah berperang akhirnya pejuang UDT terdesak mundur ke arah perbatasan dengan Nusa Tenggara Timur (Indonesia). Saat itulah pemimpin UDT yang bergabung dengan Apodeti meminta agar Indonesia masuk ke Timor Portugis dan ingin berintegrasi dengan Indonesia.

nya dikuasai Fretilin dan Gubernur Lemos dan aparatnya segera meninggalkan Dili dan mengungsi ke Pulau Atauro. Tanggal 28 November 1975 Fretilin memproklamirkan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur secara unilateral oleh Presiden Fretilin, Francisco Xavier do Amaral. Pada saat yang bersamaan pemimpin Apodeti, Trabalhista, KOTA dan UDT menandatangani petisi yang sudah dibuat Indonesia, yang isinya integrasi Timor Portugis ke dalam wilayah Indonesia, pada tanggal 30 November 1975. Rekayasa integrasi yang terkenal dengan sebutan kontroversial Deklarasi Balibo, menjadi alasan pembenaran Indonesia untuk masuk ke wilayah Timor Portugis. Selain itu propaganda melalui operasi intelijen "Operasi Komodo" dengan kampanye siaran radio, bahwa Fretilin adalah partai yang berbau komunis juga menjadi alasan kenapa Indonesia merasa perlu segera menguasai Timor Portugis.

Dengan nama sandi Operasi Seroja dan didukung kekuatan pasukan darat, laut dan udara sebanyak 10.000 orang (48.000 menurut data intelijen Falintil), pada tanggal 7 Desember 1975 dimulailah ofensif Indonesia. Sandi Operasi Seroja dimotori oleh pentolan intelijen yang saat itu asisten pribadi mantan presiden Soeharto, yakni Ali Moertopo dan salah satu aparat pelaksananya adalah Jenderal Benny Moerdani. Dengan bantuan pesawat canggih Amerika Serikat dan Inggris, mesin perang Indonesia membombardir kota Dili dan sekitarnya. Para pejuang Fretilin terpaksa mundur dan mengungsi ke pedalaman

---

***. Letaknya dari Timur sampai Barat, yang diberi nama Cordilheira Central dan terdiri dari serangkaian gunung seperti: Paitran (Los Palos); Loilari dan Matebean (Baucao); Builo', Mundo Perdido, Bibileo, Aitana (Viqueque); Gunung Maubere, Fatukmakerek, Kribas Ilmanu (Manatuto); Kaikasa, Kabalaki (Manutahi); Ramelau (Ainaru); Tapo' (Maliana), dan lain-lain.

yang bergunung-gunung*** dan sekitar 400.000 penduduk Timor Portugis turut mengungsi dengan Fretilin. Perang yang tidak seimbang itu menewaskan sekitar 200.000 jiwa rakyat Timor Portugis, 10.000 personil militer Indonesia serta 5 orang wartawan Australia.

Salah satu wartawan yang tewas itu adalah Roger East. Dia adalah wartawan yang meliput proses operasi sepanjang Balibo, Seroja dan sebelumnya operasi Komodo. Dia tewas dibawah tembakan senjata pasukan Indonesia.**** Jauh sebelum operasi Seroja dilakukan, sebenarnya Indonesia pernah melakukan serangan provokasi di perbatasan Indonesia dengan Timor Portugis pada tahun 1975, yang meng-akibatkan konflik Oekusi. Kemudian Juni 1975, pasukan Indonesia dalam jumlah kecil telah mendarat di daerah kantong kecil Oekusi-Ambeno. 6 Oktober 1975, serangan militer Indonesia diarahkan ke Fretilin dan berhasil merebut kota Batugade, Maliana dan Atabae.

Setelah Dili direbut, pemerintah Indonesia membentuk pemerintahan sementara Timor Timur yang dipimpin oleh Arnaldo dos Reis de Araujo. Indonesia juga membentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur yang terdiri dari 28 orang perwakilan yang mewakili jumlah penduduk, ketika itu sebanyak 650.000 orang. Dengan nama Majelis Rakyat Timor, 28 orang itu mengesahkan petisi Balibo untuk integrasi Timor Portugis ke dalam Indonesia. Tanggal 17 Juli 1976 melalui UU nomor 7/1976, mantan presiden Soeharto meresmikan Timor Timur sebagai propinsi ke-27 Indonesia. Hanya Australia yang segera mengakui integrasi itu, sedang PBB menolak integrasi dan menganggap Portugal sebagai negara yang mempunyai kewenangan

---

****. *Jejak-jejak Darah,* Aboeprijadi Santoso/1996 memerintah atas wilayah tersebut. Sebab menurut PBB ketika Indonesia masuk ke Timor Portugis, proses dekolonisasi sedang berlangsung dan secara *de facto* serta *de yure*, Portugal yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah tersebut. ○

III

Timor Timur Pasca Integrasi ke Indonesia

SETELAH INTEGRASI, GUBERNUR PERTAMA yang memimpin Timor Timur adalah Arnaldo dos Reis Araujo, pada tahun 1975. Arnaldo adalah pendiri partai Apodeti yang pro integrasi dan menjabat Gubernur sampai tahun 1978. Selama masa jabatannya dia lebih berkonsentrasi menyelesaikan persoalan politik dan internal di kalangan berbagai kelompok masyarakat Timor Timur dan meng-hadapi penetrasi Fretilin yang saat itu menguasai wilayah pedalaman Timor Timur. Tidak banyak pembangunan ekonomi yang bisa dilakukan Arnaldo, apalagi pada saat kepemimpinannya dinyatakan mata uang Portugal tidak berlaku dan diganti oleh Rupiah. Akibatnya proses kehi-dupan rakyat dimulai dari nol kembali.Saat Arnaldo ber-kuasa, Fretilin menyelenggarakan konperensi nasional yang pertama di Soibada, Juni 1976 (konperensi nasional yang kedua diselenggarakan di gunung Haline, Lacluta, pada Maret/April 1977). Kedua konperensi itu mengesahkan perang rakyat jangka panjang sebagai strategi politik dan dasar perjuangan mencapai pembebasan Timor Timur dan mendefinisikan prinsip-prinsip strategik dan taktik dari perang tersebut dan cara-cara bagaimana mempersatukan dan memadukan perang gerilya dengan perlawanan rakyat di bidang politik.

Gubernur berikutnya, Guilherme Maria Goncalves, bertugas sejak tahun 1978 sampai September 1982. Dia adalah Raja Atsabe dan anggota Presidium Apodeti, yang juga ikut menandatangani deklarasi Balibo, 30 November 1975. Pada masa kepemimpinannya mulai dibangun sarana infrastruktur seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dll. Namun saat itu masalah keamanan masih menjadi kendala bagi Goncalves dalam memacu gerak pembangunan. Tetapi saat berkuasa Goncalves berhasil mengirim dalam jumlah besar rombongan pemuda/i Timor Timur yang bersekolah di Pulau Jawa dan Bali. Di masa kepemimpinan Goncalves masih sering terjadi kontak senjata antara Fretilin dengan militer Indonesia.

Ofensif militer besar-besaran dilakukan ABRI mulai bulan Mei 1977 sampai dengan 22 November 1978. Ofensif militer tersebut dinamakan kampanye penyergapan dan penghancuran militer terhadap "*Bases de Apoio da Resistencia*" (BAR=Pusat Perlawanan Fretilin) di pegunungan. Ada tiga BAR Fretilin: **BAR Fronteinas** (perbatasan, di sektor barat) dengan 80.000 penduduk; **BAR Central** (di sektor tengah dibatasi dengan jalan raya Dili/Betano dan jalan raya Baucau/Viqueque), dengan 160.000 penduduk dan **BAR Pontaleste** (ujung timur termasuk Matebean) dengan 170.000 penduduk sipil. Dengan menggunakan 14 yon tempur sampai dengan 20 yon tempur yang berjumlah 24.000 personil didukung oleh kapal-kapal perang di laut dan 12 pesawat pembom *Sky Hawk* dan *Bron*co OV-10, ABRI berhasil menghancurkan kedua BAR Fronteinas dan Central dalam jangka waktu Mei 1977 sampai dengan September 1978. Presiden Fretilin, Nikolau Lobato memutuskan menggantikan BAR yang tetap dengan BAR yang mobil, yaitu BMR (*Bases Moveis da Resistencia*= Pusat Perlawanan yang bergerak) di sektor barat dan di sektor tengah. Sementara Pontaleste (ujung timur atau Matebean)

BAR-nya berhasil dihancurkan ABRI dari September sampai dengan 22 November 1978. ABRI telah menggunakan 14 yon dan 1.200 prajurit, artileri berat dan pesawat pembom, 6 *Sky Hawk* dan 4 *Bronco* OV-10.

Kontak militer besar-besaran dilakukan Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1978. Sebanyak 16.800 pasukan bersenjata lengkap didukung pesawat pembom, menyerang pusat Fretilin di sekitar Gunung Matebean, yang dihuni sekitar 160.000 rakyat sipil dan pejuang Fretilin. Banyak penduduk sipil yang ikut mengungsi ke Gunung Matebean, tewas dalam pertempuran itu. Kontak senjata besar-besaran yang terakhir dilakukan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1978 sampai dengan 31 Desember 1997. *Base Movel da Resistencia* yang dipimpin Nicolau Lobato yang pada saat itu sedang bergerak di daerah pegunungan Aitutu-Same disergap oleh enam batalion (7.200) yang telah diturunkan di pantai-pantai Natar Ue'Susu dan Natar Ue'Halu dan 2 yon lagi yang diangkut helikopter dan dialokasikan secara tiba-tiba di gunung-gunung di depan *base* Nicolau. Terjadilah pertempuran sengit selama 4 hari di mana Nicolau gugur pada tanggal 31 Desember 1978 di Same dan Carvarino serta Vicente Reis. Setelah Lobato meninggal, perlawanan frontal Fretilin berubah menjadi gerilya dengan taktik *hit and run* (tembak dan lari). Xanana Gusmao naik menjadi panglima militer Fretilin menggantikan Lobato. Xanana adalah figur dan konseptor perang gerilya Fretilin. Dia beraliran pemikiran sosialis demokrat. Selama 17 tahun berada di hutan bergerilya membuat Xanana tahu persis kondisi medan perang di wilayah Timor Timur. Karena itulah militer Indonesia tidak pernah berhasil menumpas habis gerakan militer Fretilin.

Selama tahun 1978 dan 1979 tercatat sekitar 250.000 penduduk Timor Timur, dipaksa tinggal di kamp-kamp pengungsi Indonesia dengan dalih agar bantuan makanan bisa didrop secara cepat. Namun ini adalah akal aparat militer Indonesia, untuk mengisolasi perlawanan Fretilin dari rakyat, sekaligus membuat rakyat menjadi tameng jika terjadi serangan mendadak gerilya Fretilin. Dalam masa-masa ini juga banyak rakyat yang mati kelaparan. Setelah penyerangan di Gunung Matebian, Fretilin melakukan konperensi nasional, Maret 1981 di Mabai (Lacluta) yang hasilnya mengkonsolidasikan seluruh kekuatan Fretilin dalam organisasi Falintil.

Setelah Goncalves, Gubernur selanjutnya yaitu, Mario Viegas Carrascalao, yang bertugas sejak tahun 1982 sampai Juni 1992. Carrascalao lahir di Baucau, tahun 1937 dari ayahnya yang berdarah Portugal dan ibunya asli dari Baucau. Carascalao adalah satu dari sangat sedikit orang Timor Timur yang menyandang gelar sarjana pertanian dari Universitas Teknik Lisboa, Portugal. Setelah selesai kuliah dia kembali ke Dili, tahun 1970. Dia termasuk salah seorang pendiri partai UDT, yang awalnya menginginkan Timor Timur berada dalam kekuasaan Portugal dengan status negara federasi. Salah satu adiknya, Joao Carrascalao menjadi panglima angkatan bersenjata UDT. Tahun 1976, Mario menjadi pegawai Departemen Luar Negeri dan menjadi *minister counselor* pada Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB, New York, 1980-1982.

Di masa kepemimpinan Mario dimulai proses peletakan dasar pembangunan Timor Timur yang sesuai dengan konsep Pembangunan Lima Tahun (PELITA) Indonesia. Kemudian Timor Timur dibagi menjadi 13 kabupaten, yaitu: Dili, Baucau, Manatuto, Los Palos, Viqueque, Ainaro, Manufahi, Covalima, Ambeno, Bobonaro, Liquica, Ermera dan Aileu. Saat itu sangat gencar dilakukan pembangunan sarana fisik seperti: sekolah, jalan, listrik, rumah sakit, per-tanian, dll. Gerak Mario yang super agresif membangun itu sempat menimbulkan lelucon bahwa dia adalah Guber-nur *one man show* (mengerjakan dan memutuskan sesuatu seorang diri). Mario juga mengirim ribuan pemuda/i Timor Timur belajar ke Jakarta, Surabaya, Bali, Bandung, Yogya, Semarang, dll dengan dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah Timor Timur.

Namun pemerintahan Mario tidak bisa lepas dari bayang-bayang perlawanan gerilya Fretilin yang masih terus berlangsung. Karena itu dengan mediasi dari Mario, dilakukan perundingan gencatan senjata antara Fretilin dengan ABRI, Agustus 1983. Gencatan ini diikrarkan bersama dalam sebuah pertemuan oleh Xanana dan Kolonel Purwanto dari Koopskam ABRI. Sayang perundingan ini hanya berjalan satu bulan saja. Sebab pihak ABRI membatalkannya secara sepihak karena Xanana meminta agar melibatkan PBB dalam proses pasca gencatan senjata. Cerita dibalik batalnya gencatan senjata adalah adanya upaya militer Indonesia untuk mendaftar pemuda Timor Timur ke dalam dinas wajib militer yang disebut "Hansip" dan "Ratih". Puluhan ribu Hansip ini tewas sia-sia karena mereka hanya dijadikan boneka dan tameng yang berdiri di depan medan pertempuran selama militer Indonesia melancarkan operasi pembersihan Fretilin.*

Setelah gencatan senjata batal Fretilin mulai berpikir untuk berjuang dengan memakai cara diplomasi internasional. Saat itulah Fretilin mulai mengevaluasi proses perjuangannya dan meredefinisikan arah perlawanan. Karena itulah akhirnya diadakan konperensi Aitana, tahun 1988. Dalam konperensi itu diputuskan keadaan "non partai".

---

*. Buku Timor Timur untuk Pemula, 1997

Artinya bentuk perlawanan harus ada strategi diplomasi internasional dan melibatkan semua komponen masyarakat Timor Timur tanpa peduli apa latar belakang partainya, termasuk mengajak bergabung partai UDT, Apodeti, dll. Konperensi ini melahirkan terbentuknya *Conselho Nacional de Resistencia Maubere* (CNRM/Dewan Nasional untuk Perlawanan Maubere). CNRM adalah sebagai front persatuan nasional yang diketuai oleh Xanana Gusmao. Dengan Ramos Horta sebagai wakil ketua maka dimulailah strategi perjuangan dengan cara kampanye diplomasi internasional, yang ternyata sangat efektif dilakukan oleh Ramos Horta di seluruh belahan dunia.

Adanya reformasi dalam strategi perjuangan Fretilin, juga dicermati oleh Gubernur Mario. Mario adalah konseptor keluarnya Keputusan Presiden no 62 tahun 1988 yang menyatakan Timor Timur sebagai daerah terbuka dan sama kondisinya dengan propinsi lain. Mario yang memper-juangkan keterbukaan ini, dengan maksud mengundang investor asing mau menanamkan modalnya di Timor Timur. Tetapi belakangan keterbukaan ini justru menjadi bumerang karena setelah terbuka, Timor Timur justru di-banjiri warga pendatang dari pulau Jawa, Madura, Sulawesi, Sumatera, dll. Warga pendatang ini mengambil semua jenis lapangan kerja yang tersedia, termasuk juga sebagai penjual jasa dan pedagang.

Pemuda/i Timor Timur yang sulit mendapatkan pekerjaan dan tidak terjadinya pemerataan ekonomi membuat banyak rakyat kecewa. Kekecewaan itu meletup dalam setiap aksi unjuk rasa pemuda/i yang terjadi selama Mario menjadi Gubernur. Puncaknya adalah peristiwa Santa Cruz. Mario sangat terpukul dengan peristiwa itu dan mengatakan diperlukan waktu lama dan pendekatan khusus untuk meraih kembali hati rakyat Timor Timur.

Di jaman Mario berkuasa, polarisasi kepartaian dan bibit perpecahan masih tetap ada. Hal itu terbukti ketika terjadi tragedi Santa Cruz, terjadi saling tuduh antara UDT dan Apodeti mengenai pihak siapa yang merekayasa tragedi tersebut.**

Setelah menyelesaikan jabatannya selama 10 tahun, Mario diganti oleh Abilio Osorio Soares, pada tahun 1992. Pada masa awal proses integrasi nama Abilio yang mantan Bupati itu, tidak pernah disebut-sebut. Hanya kakaknya, Jose Osorio Soares adalah salah satu tokoh Apodeti. Keber-hasilan Abilio menjadi Gubernur berkat dukungan me-nantu Presiden Soeharto, Letjen Prabowo. Prabowo yang semasa bertugas di Dili bersahabat karib dengan Abilio dan menjadikan Abilio sebagai salah satu informannya yang paling setia di Timor Timur.

Bibit perpecahan akibat polarisasi partai masih terasa, karena Abilio banyak mengangkat pejabat di daerah Timor Timur yang berasal dari pendukung partai Apodeti. Sebaliknya pejabat pendukung partai UDT yang berkuasa di masa Gubernur Mario Viegas, justru tidak mendapat jabatan strategis. Di masa kepemimpinannya, Abilio belum berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Timor Timur, yang hanya sekitar Rp 3 miliar setiap tahunnya. Karena itu Timor Timur terus mendapat subsidi dan anggaran proyek pembangunan dari pemerintah Indonesia, yang jumlahnya sampai puluhan miliar per tahunnya. Atas dasar itulah mungkin kenapa Abilio selalu menyatakan tidak setuju jika Timor Timur lepas dari Indonesia.

Sementara itu program penanaman modal investor asing versi Abilio, tidak begitu berhasil karena investor masih ragu menanamkan modalnya di wilayah yang menurut para investor belum stabil keamanan dan kinerja pemerintahannya. Akibatnya tak banyak keberhasilan yang bisa dilakukan Abilio dalam masa kepemimpinannya. Tetapi *toh* walaupun banyak diprotes oleh warganya sendiri, Abilio terpilih kembali menjadi Gubernur untuk periode ke dua, 1997-2002. Menurut pemerintah pusat, di Timor Timur tidak perlu Gubernur yang pintar dan berhasil. Yang penting dia loyal dan taat pada perintah pemerintah pusat. Ketaatan itu membuat Abilio selalu mengkambinghitamkan Fretilin jika terjadi demonstrasi rakyat di wilayah Timor Timur. Padahal rakyat berdemo bukan hanya karena soal anti integrasi tetapi tidak terjadinya keadilan hak-hak sipil dan pemerataan ekonomi rakyat. ❍

---

*. Majalah Editor, 8 Februari 1992

IV

Politik Isolasi Timor Timur & Tragedi Santa Cruz

SALAH SATU UPAYA EFEKTIF UNTUK MENGisolasi rakyat Timor Timur dari interaksi dunia luar dan agar tidak bisa bebas bepergian ke bagian dunia manapun, adalah pemberlakukan surat izin masuk dan keluar Timor Timur. Isolasi itu dimulai sejak Timor Timur dianeksasi oleh Indonesia, pada tahun 1975. Isolasi itu juga termasuk jalur hubungan kontak komunikasi yang semuanya dibuat dan dikontrol oleh aparat keamanan ABRI. Ironisnya isolasi itu juga berlaku di dalam wilayah Timor Timur. Sehingga jika rakyat bepergian dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya harus ada surat izin.

Untuk mendapatkan surat izin itu sangat sulit karena prosedurnya harus melalui birokrasi dan skrining yang ketat dan memakan waktu yang lama. Akibatnya proses interaksi kehidupan rakyat Timor Timur seperti terkung-kung dalam penjara besar. Politik surat izin itu baru dicabut pada Januari 1989, setelah pemerintah Indonesia menyata-kan Timor Timur sebagai daerah bebas dan terbuka. Walaupun sudah dicabut tetapi secara *de facto*, sampai saat ini rakyat Timor Timur belum bisa bebas bepergian dengan rasa aman tanpa merasa dibayangi aparat. Karena itulah dalam pertemuannya dengan penguasa politik Indonesia saat ini, Habibie, Uskup Dili, Carlos Ximenes Belo menyatakan agar pemerintah Indonesia memberi kebebasan kepada rakyat Timor Timur untuk bepergian kemana saja.*

Namun ketentuan penghapusan surat izin tidak selamanya menguntungkan rakyat Timor Timur. Sebab setelah Timor Timur dinyatakan terbuka, berdatanganlah puluhan ribu migran dari Pulau Jawa, Sulawesi, dll. Dengan cepat kaum migran menguasai sektor pekerjaan pelayanan jasa, berdagang, buruh, dll. Banjir migran ini membuat tingkat pengangguran penduduk asli di Timor Timur semakin besar. Sebab yang datang bukan hanya kelas buruh, pedagang dan transmigran tetapi juga kaum terdidik. Kaum terdidik inilah yang menjadi pegawai negeri dan swasta, serta menutup peluang kerja bagi rakyat asli, yang baru menyelesaikan sekolahnya setelah kaum migran ini punya pekerjaan tetap.

Akibatnya timbullah berbagai kecemburuan sosial di kalangan penduduk asli. Sampai para pendatang ini di cap sebagai "batalyon 702". Artinya para pendatang baru yang berangkat kerja pada pukul tujuh pagi (7), lalu pekerjaannya tidak menghasilkan keuntungan bagi ekonomi rakyat setempat (0) dan kembali ke rumah pukul dua siang (2). Menurut data yang ada dari sekitar 850.000 penduduk Timor Timur (30.000 personil ABRI dan 30.000 pegawai negeri dan keluarganya) terdapat 16.000 penduduk asli terdidik mulai dari SD sampai sarjana yang menganggur. Data ini bisa bertambah dalam suasana krisis moneter yang terus berkepanjangan saat ini.

Sampai sekarang masalah pengangguran ini tidak bisa terselesaikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya akumulasi dan kombinasi kekecewaan di kalangan penduduk asli semakin besar. Rakyat termasuk kaum terdidik yang tadinya pro integrasi lambat laun menjadi anti integrasi. Sebab ternyata integrasi bukannya membuat mereka semakin sejahtera, tetapi justru membuat mereka menjadi warga kelas dua di tanah airnya sendiri. Puncak dari kekecewaan itu adalah terjadinya peristiwa pembantaian Santa Cruz, di Dili, 12 November 1991.

---

*. *Suara Pembaruan*, 24 Juni 1998.

Peristiwa ini bermula dari aksi unjuk rasa pemuda untuk menghormati tokoh mahasiswa, Sebastiao Gomez, yang dimakamkan di Santa Cruz, setelah dia tewas dalam perkelahian yang direkayasa aparat intelijen dalam peristiwa di Gereja Motael, Dili, 28 Oktober 1991. Unjuk rasa ini juga sebagai protes terhadap pembatalan kunjungan delegasi parlemen Portugal, awal November 1991, karena Indonesia menolak kehadiran seorang anggota delegasi yang juga wartawan di Lisabon.

Unjuk rasa yang diikuti sekitar 1000 orang ini awalnya berlangsung dengan tertib dan damai. Namun tiba-tiba tanpa ada peringatan terlebih dahulu muncul 1000 orang tentara Indonesia, yang secara membabi buta menembaki para pengunjuk rasa. Akibatnya tidak hanya pemuda yang tewas tetapi juga ibu rumah tangga dan anak kecil. Menurut buku *East Timor for Beginners,* tercatat 271 orang tewas, 250 orang hilang, 382 orang luka-luka dan 362 orang ditangkap. Sementara menurut Komisi Penyelidik Nasional (KPN) yang resmi dibentuk pemerintah Indonesia, ada sekitar 50 orang yang meninggal, 90 orang hilang dan 90 orang luka-luka. Data ini jauh dari pengumuman resmi ABRI, yang menyatakan hanya 19 orang yang tewas.

Sikap represif aparat keamanan tidak berhenti di situ saja. Sebab sebanyak 50 orang mahasiswa dan pemuda Timor Timur yang berunjuk rasa memprotes insiden Santa

Cruz, malah ditangkap dan dihukum di Jakarta dan Dili. Selain itu kegiatan hak asasi dan hak sipil rakyat dibatasi. Peristiwa ini oleh PBB dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terburuk dalam sejarah rejim Soeharto. Sedangkan aparat militer yang melakukan penembakan memang diadili melalui peradilan militer namun prosesnya tidak dilakukan secara transparan. Sedangkan atasan aparat itu, Panglima Kodam Udayana, Mayjen Sintong Panjaitan dan Panglima Komando Operasi Keamanan Timor Timur, Brigjen R S Warouw, dicopot dari jabatannya, tetapi tidak dihukum melalui peradilan militer.

Peristiwa berdarah itu menarik perhatian media internasional dan Indonesia pun diprotes oleh banyak negara. Apalagi peristiwa itu terjadi di depan mata pejabat PBB dan *rapporteur* (pelapor) khusus tentang penyiksaan, Peter Kooijmans. Dari data pejabat PBB yang sedang berkunjung di Dili itulah, PBB mengeluarkan berbagai rekomendasi yang mencakup penyelidikan ulang atas pembunuhan besar-besaran Santa Cruz, perbaikan situasi hak asasi manusia di Timor Timur, kebebasan masuk ke Timor Timur bagi organisasi hak asasi manusia dan lembaga independen lainnya. Rekomendasi lainnya adalah pembicaraaan menyeluruh masalah Timor Timur yang melibatkan semua unsur perlawanan rakyat Timor Timur, termasuk Xanana Gusmao. ❍

V

Xanana Gusmao Ditangkap & Perjuangan Fretilin

NAMUN REKOMENDASI PBB TIDAK DITANGGAPI serius oleh Indonesia. 20 November 1992, ABRI dengan bantuan intel orang Timor Timur yang disebut *Mau Hu'u* menangkap Xanana di Dili. Melalui peradilan Indonesia yang direkayasa dan tanpa diberi kesempatan membela diri, Xanana dihukum seumur hidup. Hakim menghukumnya sebagai seorang kriminal, meski peradilan Indonesia sebenarnya telah melanggar hukum nasional dan terlebih lagi hukum internasional, sebab wilayah Timor Timur resminya masih berada di bawah yurisdiksi PBB sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, dan karena itu tidak berlaku hukum Indonesia di Timor Timur.

Pemimpin perlawanan Timor Timur, yang bernama lengkap Jose Alexandre Gusmao dan nama "perangnya" Kay Rala Xanana, akhirnya dijatuhi hukuman penjara 20 tahun dan sampai saat ini mendekam di Penjara Cipinang, Jakarta Timur. Xanana yang dilahirkan di Manatuto, 21 Juni 1940, adalah simbol nasional dan pemersatu perjuangan kemerdekaan rakyatnya. Pengalamannya sebagai panglima gerilya Falintil (tentara Pembebasan Timor Leste) berperang selama 17 tahun di hutan Timor Timur, membuat dia sangat mengerti arti perang rakyat revolusioner. Selama di hutan dia menulis catatan kritis mengenai Timor Timur yang berjudul "Negara dan Revolusi" dan "Tema-tema

Mengenai Perang". Xanana adalah juga Ketua Dewan Perlawanan Nasional Maubere CNRM. Ketika mengetahui Xanana ditangkap, orang Timor Timur mengatakan, "Bagi kami semua orang Timor Timur adalah Xanana. Jika seorang Xanana ditangkap, Xanana yang lain akan muncul dengan segera".

Menurut Xanana masuknya Indonesia ke Timor Timur sangat bertentangan dengan prinsip deklarasi konperensi Asia-Afrika di Bandung 1955, yang justru disponsori Indonesia. Deklarasi itu sangat mengagung-agungkan anti kolonialisme dan hak setiap rakyat untuk merdeka serta berdaulat dinegaranya sendiri. Yang kami lawan adalah campurtangan Indonesia dan menolak diperintah Indonesia. Kami ini bangsa lain dengan sejarah yang sangat berlainan dengan Indonesia. Kami baru mau memulai dengan proses dekolonisasi dan Indonesia tiba-tiba mencaplok dengan alasan pembenaran deklarasi Balibo yang penuh rekayasa itu. Hal itu jelas menunjukkan Indonesia melakukan rekolonisasi atau menjajah kembali Timor Timur, ujar Xanana dalam buku "*Jejak-jejak Darah*/1996".

Selama berjuang di hutan dan bertempur dengan ABRI, Xanana mengaku tidak semua militer Indonesia seperti mesin pembunuh. Awal 1979 banyak prajurit ABRI yang merasa bahwa perang ini sebenarnya tidak ada manfaatnya. Banyak orang Fretilin yang ditawan tapi di malam hari dilepas. Tidak pernah ada desersi tentara Indonesia tapi banyak batalyon ABRI yang menghindari bentrokan senjata dengan Fretilin. Sering di hutan Fretilin menemukan obat-obatan, kebutuhan logistik dan sedikit amunisi yang ditinggalkan begitu saja di hutan. Prajurit ABRI ada juga yang bertemu rakyat di pedalaman dan mengatakan memahami kenapa rakyat Timor Timur berperang untuk kemerdekaan. Sejak tahun 1987, karena operasi ABRI kurang begitu sukses, maka kontrol pasukan Kopassus semakin besar. Sejak komando dipegang Kopassus banyak terjadi operasi militer yang menimbulkan banyak korban di kalangan penduduk sipil yang belum tentu Fretilin, lanjut Xanana.

Kesadisan tentara Indonesia bisa dilihat ketika kelompok klandestin ditangkap ABRI di Muapitine dan Laline, 1981. Setelah disiksa para klandestin ini ditusuk sampai mati dengan pisau oleh rakyat sipil yang dipaksa ABRI untuk melakukannya. Penusukan itu dilakukan di depan keluarga korban dan para wanita yang menangisi kematian anak dan suaminya. Para wanita ini lalu ada yang diperkosa dan orang tua yang memprotes dibunuh. Selain dengan cara membunuh banyak anggota Fretilin yang setelah mati lalu dikuliti dan ada yang dipenggal kepalanya, ujar Xanana. "Saya tidak bisa menyalahkan para prajurit pelaku pembunuhan sadis itu, sebab mereka menjalankan perintah para komandan militer yang haus darah dan ingin cepat promosi jabatan dan pangkat. Sudah menjadi rahasia umum siapa perwira militer yang berhasil membunuh banyak Fretilin akan cepat naik pangkat dan promosi," tambah Xanana.

Padahal prajurit ABRI yang ada di hutan-hutan secara psikologis juga punya beban mental yang sangat berat. Sebab mereka banyak yang tidak tahu apa makna perang ini sebenarnya. Karena perang tidak pernah berakhir sementara korban terus berjatuhan di pihak ABRI dan rakyat, membuat akumulasi kekecewaan psikologis dan mental bertambah besar. Salah satu prajurit ABRI bernama Sersan Edi yang tertinggal dalam keadaan luka tembak di medan perang, tahun 1977. Setelah lukanya diobati Fretilin, Edi lalu bergabung bersama Fretilin dalam perang Gerilya. Sersan Edi berada satu kompi dengan Xanana mulai dari tahun 1977-1979 dan mengajar bahasa Indonesia kepada prajurit Fretilin. Atas saran Xanana akhirnya sersan Edi menyerahkan diri kepada ABRI pada tahun 1979. Dia lalu dihukum empat tahun di Denpasar, Bali, karena dianggap desersi dan dibebastugaskan dari militer.

Setelah Xanana ditangkap, perlawanan Fretilin dipimpin oleh Ma' Hunu. Namun April 1993 dia ditangkap ABRI dan digantikan oleh Konis Santana. Namun karena luka-luka yang dideritanya, Konis meninggal di hutan sekitar Atsabe, pada 28 Maret 1998. Selain bentuk perlawanan gerilya militer, para pemuda dan pelajar Timor Timur yang menginginkan kemerdekaan juga membentuk perlawanan nasional pelajar Timor Timur (*Resistencia Nacional dos estudantes de Timor Leste*/RENETIL). Sekjen Renetil, Fernando de Araujo, dihukum 9 tahun karena melakukan aksi unjuk rasa memprotes terjadinya peristiwa Santa Cruz.

Anggota Renetil selain di Timor Timur juga terdapat di sejumlah universitas dan pelajar/mahasiswa di Pulau Jawa, Bali, Nusatenggara, Sumatera, Australia, Belanda, Irlandia dan Portugal. Renetil juga bekerjasama dengan kelompok pemuda Timor Timur yang lebih moderat yaitu Ikatan Mahasiswa Pemuda Pemudi Timor Timur (IMPETTU). Selain itu aktivitas gerakan *clandestine* yang melakukan perlawanan dengan aksi kejutan seperti perakitan bom, yang digunakan untuk perang gerilya di hutan. Aksi yang spektakuler dari para pemuda dan mahasiswa ini adalah ketika mereka (30 orang) melakukan aksi lompat pagar ke kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta, September 1994. Padahal pada saat itu penjagaan keamanan sangat ketat karena sedang berlangsung Konperensi APEC yang dihadiri Presiden dari belahan Asia Pasifik.

Aksi lompat pagar ini berhasil menarik perhatian dunia internasional mengenai masalah Timor Timur. Ketiga puluh orang itu mendapat suaka dari pemerintah Portugal dan saat ini sedang bersekolah di sana. Setelah aksi itu semakin banyak pemuda Timor Timur yang melakukan aksi lompat pagar ke sejumlah Kedutaan Besar asing. Terakhir 4 orang Timor Timur meminta suaka ke Kedutaan Besar Austria, Agustus 1997 dan sampai sekarang mereka masih berada di sana. Pemerintah Austria tidak berani memberi mereka suaka karena tekanan Indonesia, yang menilai 4 orang itu diduga terlibat dalam kasus ledakan bom di Semarang.

Salah satu unsur perlawanan pemuda lainnya adalah komunitas gerakan mahasiswa yang kuliah di kampus Universitas Timor Timur (UNTIM). Kampus UNTIM didominasi oleh mahasiswa yang menolak integrasi dan menginginkan terlaksananya referendum. Kampus ini menjadi simbol perlawanan terhadap pendekatan keamanan dan cara-cara kekerasan yang dilakukan ABRI dalam operasi militer dan anti *clandestine* di Timor Timur. Sampai sekarang ABRI dan Pemda tidak bisa mengontrol komunitas aksi dan kaum intelektual kritis di kampus independen ini. Paling-paling yang bisa dilakukan aparat hanya propaganda bahwa para simpatisan perlawanan pemuda itu sebagai bagian dari anggota Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Namun propaganda GPK ini sudah kuno dan paling hanya laku dijual kepada kampanye melalui media massa, yang memang sudah dipaksa untuk hanya memuat berita mengenai Timor Timur yang pro integrasi.

Menurut buku "Jejak-jejak Darah" perang di Timor Timur sampai sekarang tercatat 200.000 lebih rakyat Timor Timur dan sekitar 17.000 anggota ABRI tewas akibat perang yang tiada akhir ini. Tidak semua perwira militer ABRI yang setuju dengan rencana pengambilalihan Timor Timur. Letnan Kolonel Soebiyanto dalam buku Jejak-jejak Darah, mengatakan Indonesia merampas kekuasaan di Timor Timur, padahal waktu itu sudah berdiri Republik Timor

Timur yang merdeka. Karena itu dia menolak melanjutkan tugasnya di Timor Timur sebab Soebiyanto melihat sendiri terjadinya pembantaian rakyat oleh ABRI, yang belum tentu adalah orang Fretilin. Padahal selama Portugal berabad-abad menjajah Timor Timur tidak ada pembantaian terus menerus. "Karena itu saya pikir saya hanya mengantarkan nyawa saja ke Timor Timur dan banyak ABRI yang merasa terperangkap jatuh atau terlanjur masuk lumpur dalam perang di Timor Timur," ujar Soebiyanto, yang tidak naik pangkat selama empat tahun karena menolak melanjutkan tugasnya di Dili.

Walaupun banyak pihak yang menyoroti sepak terjang militer Indonesia di Timor Timur, namun operasi militer dan strategi pendekatan keamanan di Timor Timur terus berlangsung sampai sekarang. Rakyat Timor Timur pun dimanfaatkan untuk menjadi informan di antara sesama rakyat Timor Timur sendiri. Satu diantara jaringan intelijen militer yang paling ditakuti yaitu "Bufo" atau Mau Hu'u yang artinya mata-mata orang Timor Timur. Lalu Lembaga Garda Paksi Penegak Integrasi adalah salah satu lembaga pro integrasi yang disponsori militer Indonesia. Selain itu adanya "pasukan Ninja" yang bertindak selaku lembaga ekstra yudisial, yang bisa menganiaya, menculik, menghukum dan menghabisi nyawa rakyat Timor Timur tanpa melalui proses hukum. Menurut Ramos Horta dalam tulisannya di *International Herald Tribune*, pasukan Ninja ini adalah pasukan khusus elit militer Indonesia. Gerak pasukan ini tak bisa tersentuh dan terdeteksi sebab komandonya di luar kebijakan komando resmi aparat keamanan Timor Timur. Banyak rakyat Timor Timur yang teraniaya, hilang dan mati akibat berbagai aksi lembaga dan pasukan ekstra yudisial ini. ❍

VI Masalah Sosial Ekonomi, Politik Transmigrasi, Perempuan & Keluarga Berencana

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TIMOR Timur yang tidak lebih dari Rp 3 miliar per tahun, disebabkan karena rendahnya pendapatan per kapita Timor Timur, yang hanya Rp 180.727 (1990). Selama 24 tahun integrasi, Indonesia memberikan Daftar Isian Proyek sekitar Rp 100 miliar setiap tahun kepada pembangunan infrastruktur di Timor Timur. Kondisi keuangan seperti itu ditambah dengan sumber daya alam yang terbatas yang tidak bisa memenuhi secara total kebutuhan rakyat Timor Timur, membuat Indonesia selalu merasa punya pembenaran dan berkepentingan terhadap eksistensi Timor Timur. Indonesia merasa sudah terlampau banyak dana dan tenaga yang diberikan untuk Timor Timur. Karena itu tidak bisa dikorbankan begitu saja demi alasan menolak integrasi.

Namun kecilnya pendapatan itu tidak akan sebanding jika produksi utama Timor Timur yaitu: kopi, kayu cendana dan usaha perikanan dikelola secara maksimal, kontiniu dan profesional. Misalnya program pertanian, jika dilakukan dengan mekanisasi tepat guna dan melibatkan petani Timor Timur yang terlatih, pasti akan mendatangkan hasil. Belum lagi usaha eksplorasi minyak dan gas bumi di Celah Timor, yang jika nanti bisa berproduksi akan mampu membiayai kebutuhan hidup seluruh rakyat Timor Timur. Atas dasar itulah, sebenarnya sumber daya alam Timor Timur tidaklah semiskin seperti yang diduga banyak pihak.

Selama integrasi memang pembangunan sarana infrastruktur fisik gencar dilakukan pemerintah Indonesia. Jalan raya, gedung kantor megah, fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, didirikan dengan simultan. Selain untuk mengambil hati masyarakat Timor Timur, pembangunan itu juga dimaksudkan sebagai kampanye propaganda bahwa cara ko-lonialis Indonesia jauh lebih baik dari Portugal yang tidak membangun sarana infrastruktur selama menjajah Timor Timur. Namun apakah memang itu yang diinginkan rakyat Timor Timur? Seharusnya rakyat cukup puas dengan pem-bangunan tersebut. Tetapi ternyata cara mengambil hati seperti itu tidak bisa diterima oleh keluhuran harga diri dan budaya rakyat Timor Timur. Buktinya selama integrasi tidak terhitung berapa kali terjadi unjuk rasa dan perang fisik dari rakyat Timor Timur yang memprotes cara-cara Indonesia dalam melakukan politik pembangunan.

Beberapa masalah dalam pembangunan ini adalah kurangnya partisipasi prakarsa masyarakat, lapangan kerja yang terbatas dan masih tipisnya perasaan di kalangan rakyat Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Hal ini melahirkan pertanyaan mendasar, berhasilkah pembangunan selama ini? Siapakah yang menikmati hasilnya? dan Apakah terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan? Memang untuk menjawab pertanyaan di atas tidak mudah. Karena itu perlu dicari akar permasalahannya dan dirumuskan secara spesifik, lalu dicari solusi yang paling pas.

Kondisi sosial ekonomi yang timpang di atas, antara lain terjadi karena rakyat banyak yang belum mendapatkan mata pencarian yang tetap, orientasi aparat pelaksana pembangunan yang mengutamakan esensi kuantitas daripada nilai kualitas, skala prioritas pembangunan yang dominan pada bukan wilayah pedalaman, kinerja aparat yang tidak profesional, banyaknya terjadi korupsi kolusi dan nepotisme, ketergantungan yang realtif besar pada pemerintah pusat, tingkat pengganggguran yang tinggi, hasil produksi pertanian/perkebunan/perikanan yang belum memadai, tidak dilibatkannya prakarsa dan aspirasi masyarakat, pola pembangunan yang berorientasi pada pola *top down* dan bukan *bottom up*, dominannya intervensi pemerintah pusat dan berbagai faktor lainnya.

Akibat dari semua hal diatas politik pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum berhasil maksimal. Hasil pembangunan hanya dinikmati segolongan elit penguasa dan pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Karena tidak adanya pemerataan ekonomi hasil pembangunan, membuat kekecewaan rakyat semakin bertumpuk-tumpuk. Hal itu baru faktor ekonomi, belum lagi faktor kekecewaan politik seperti masih kuatnya trauma dari tragedi Santa Cruz. Akibatnya masalahnya menjadi sangat kompleks dan menimbulkan kesan pada rakyat bahwa tidak ada niat serius dari pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah itu. Akumulasi kekecewaan yang menumpuk membuat sebagian rakyat yang tadinya pro integrasi, berbalik menginginkan adanya penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur.

Selain pembangunan sektor ekonomi, pada tahun 1980 pemerintah Indonesia secara gencar mulai melancarkan program Keluarga Berencana (KB) dalam bentuk sterilisasi massal yang bersifat paksa terhadap perempuan Timor Timur. Dengan menggunakan cara-cara yang dilarang di negara Barat, Indonesia menciptakan metodis sterilisasi untuk jangka panjang. Seperti penggunaan implantasi, suntikan dan *norplant* (alat kontrasepsi hormon jangka panjang). Mulai bulan Juni 1985 sampai sekarang tercatat sekitar 150.000 perempuan Timor Timur yang disterilisasi. Program KB ini banyak ditolak oleh perempuan dan keluarga rakyat Timor Timur. Namun program KB yang dilakukan dibawah todongan senjata ini dimaksudkan untuk menghambat populasi rakyat asli Timor Timur. Akibatnya perempuan Timor Timur ada yang meninggal karena setelah sadar bahwa KB merugikan, mereka lalu berusaha mengeluarkan sendiri alat KB tanpa bantuan petugas kesehatan.

Dalam konperensi kependudukan dan perempuan dunia di Beijing, 1995, PBB menerbitkan laporan yang mengenai program KB paksa ini. Menurut PBB cara pengendalian kelahiran paksa terhadap perempuan Timor Timur mempunyai pengaruh fisik maupun psikologis dalam jangka panjang. Sehingga prinsip KB yang seharusnya untuk mensejahterahkan masyarakat justru pada akhirnya bisa membuat rakyat menjadi tidak sejahtera karena proses reproduksinya terhambat. Ketika Gubernur dijabat Mario Carrascalao, dia sempat memprotes program KB yang menurutnya belum perlu dilakukan di Timor Timur. Karena keseimbangan tingkat populasi belum sepadat penduduk di pulau Jawa. Namun protes itu tidak diperdulikan pemerintah pusat dan program KB terus dilakukan dengan terencana dan sistematis.

Program lain yang juga dimaksudkan untuk menghambat populasi rakyat Timor Timur dan mempercepat proses Indonesianisasi adalah program transmigrasi. Program ini dilakukan dengan terencana sejak tahun 1985 dan tercatat sebanyak 50.000 warga pendatang sudah bertransmigrasi ke Timor Timur. Jumlah ini belum termasuk dengan para transmigran spontan yang bekerja menjadi pedagang, buruh, penjual jasa, dll. Saat ini dengan jumlah penduduk sekitar 850.000 jiwa, di Timor Timur terdapat sekitar 150.000 orang pendatang termasuk aparat militer. Para transmigran ini kebanyakan beragama Muslim dan karena proses adaptasi yang tidak kondusif sehingga terjadi ketegangan sosio ekonomis dan isu adanya politik Islamisasi di wilayah Timor Timur.

Para transmigran ini didatangkan dari Jawa Tengah, Bali dan Jawa Timur. Mereka diberi lahan subur di wilayah Kovalima, Maliana, Baucau, dan Viqueque. Pemerintah juga memberikan modal usaha, alat pertanian, pupuk, dan bibit tanaman. Kehadiran para transmigran tidak disambut oleh warga setempat karena lokasi lahan mereka berada di tanah adat milik warga setempat. Akibatnya terjadi konflik kepentingan antara warga setempat dengan transmigran yang merasa di-*back up* aparat pemerintah. Para transmigran ini yang kemudian membentuk desa-desa binaan yang dikelola bekerjasama dengan batalyon teritorial ABRI.

Untuk mempercepat proses pembinaan dilakukan perkawinan antara pria transmigran dengan perempuan Timor Timur. Jika tidak mau para perempuan ini tidak diberi kebutuhan pokok dan diancam akan disterilisasi KB atau dianiaya. Namun penderitaan paling parah yang dialami perempuan Timor Timur adalah banyaknya kasus pelecehan seksual. Menurut laporan *Amnesty International*, pada tahun 1993, ribuan perempuan Timor Timur disiksa, ditelanjangi dan lalu diperkosa oleh oknum petugas keamanan. Mereka dituduh sebagai informan dan memberi kebutuhan logistik bagi pejuang Fretilin yang ada di hutan. Para perempuan ini juga ada yang ditahan tanpa proses hukum. Menurut *Amnesty*, apa yang dialami perempuan Timor Timur ini adalah suatu bentuk pelanggaran yang paling berat dalam nilai degradasi manusia.

Selain itu menurut laporan Dana Kependudukan PBB tahun 1996, Timor Timur memiliki angka kematian bayi terbesar di antara 30 wilayah di dunia. Dengan angka kematian 135 jiwa per 1000 kelahiran. Timor Timur juga memiliki angka harapan hidup terendah di antara negara-negara yang berstatus sama. Laporan populasi dunia PBB tahun 1996 menyatakan angka harapan hidup bagi wanita Timor Timur adalah 48,4 tahun dan pria, 46,7 tahun. ○

VII

Persepsi Dunia Internasional & Peran PBB

BAGI MASYARAKAT INTERNASIONAL TERmasuk PBB, masalah Timor Timur belum dianggap selesai walaupun Indonesia menyatakan Timor Timur sebagai pro-pinsi ke-27. Selain karena secara hukum internasional memang posisi Indonesia lemah juga ada beberapa fakta yang lebih dulu muncul sebelum integrasi yang menunjukkan Indonesia mengakui kedaulatan rakyat Timor Timur. Pada bulan Juni 1975, ketika bertemu dengan Menteri Luar Negeri Fretilin, Ramos Horta di Jakarta, Menlu Indonesia saat itu, Adam Malik secara tegas mengatakan bahwa Indonesia menghormati aspirasi kemerdekaan Timor Timur. “Kemerdekaan setiap negara adalah hak setiap bangsa, tidak terkecuali bagi rakyat Timor Timur,” ujar Adam Malik.

Pernyataan itu diperkuat setelah sebelumnya pada tahun 1949, ketika Timor Barat (sekarang NTT) menjadi bagian Indonesia setelah memperoleh kemerdekaan dari Belanda, Menteri Luar Negeri saat itu, Soebandrio mengatakan “Mengenai separoh pulau Timor yang di bawah Portugal, Indonesia tidak mempunyai klaim teritorial sama sekali”. Dua fakta itu menunjukkan ketidakkonsistenan sikap politik Indonesia dan diperkuat fakta bahwa tidak semua rakyat Timor Timur ingin integrasi. Apalagi menurut PBB, secara *de yure*, Portugal adalah penguasa administratif wilayah Timor Timur.

Karena Indonesia terus bertahan di Timor Timur, akhirnya, 13 April 1976, keluar resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk Indonesia atas penyerbuan pasukannya ke Timor Timur.* Resolusi juga memutuskan agar Indonesia segera menarik mundur pasukannya dari Timor Timur dan memberi mandat kepada Sekjen PBB untuk mengadakan penyelidikan atas situasi di Timor Timur. Namun resolusi itu tidak dipatuhi Indonesia dan pasukan Indonesia tetap bercokol di Timor Timur. 17 November 1976 PBB melakukan pemungutan suara untuk merancang resolusi yang isinya agar PBB menolak penggabungan Timor Timur ke dalam Indonesia dan menyerukan penarik-an pasukan Indonesia.

Resolusi itu diajukan ke sidang umum ke-31 PBB dan disetujui oleh 61 negara, ditolak oleh 18 negara serta tercatat 49 negara abstain. Negara-negara yang mendukung resolusi antara lain: Guine Bissau, RRC, Kuba, Tanzania, Mozambique, Aljazair dan Kongo. Sedang yang mendukung Indonesia antara lain: India, Jepang, Amerika Serikat, dan semua negara anggota Asean. Dari komposisi ini terlihat negara yang mendukung Indonesia adalah negara blok barat/kapitalis Amerika Serikat. Sedang yang mendukung Portugal adalah negara blok Timur/komunis RRC. Saat itu memang sedang hangat-hangatnya perang dingin antara Blok Barat dan Timur. Amerika Serikat yang terpengaruh provokasi Indonesia bahwa penguasa Timor Timur sebe-lum integrasi adalah berpandangan Marxis, secara jelas menyetujui integrasi.

Dukungan Amerika kepada Indonesia sudah diberikan dua hari sebelum tanggal 7 Desember 1975, saat dimulainya penyerbuan ke Timor Timur (Operasi Seroja). Tanggal 5 Desember 1975, Presiden Amerika Serikat Gerald Ford dan Menlu Kissinger, mampir ke Jakarta dalam suatu lawatan ke benua Asia. Kedatangan mereka ke Jakarta, ditafsirkan sebagai lampu hijau bagi Indonesia untuk memasuki Timor Timur yang dikhawatirkan jatuh ketangan kelompok kiri. Padahal rakyat Timor Timur yang mayoritas penganut agama Katolik yang taat, tidaklah adil dicap secara sepihak sebagai kekuatan kelompok kiri komunis.

---

*. Sinar Harapan, 23 April 1976.

Pemungutan suara di PBB kembali dilakukan pada tahun 1982. Saat itu 50 negara menentang Indonesia dan 46 negara mendukung serta 46 negara abstain. Sejak tanggal 22 September 1983 dalam sidang umum PBB selanjutnya, tidak lagi memasukkan masalah Timor Timur dalam agenda perdebatan. Penangguhan masalah Timor Timur dimaksudkan agar memberi kesempatan kepada Sekjen PBB menyelesaikan langsung masalah Timor Timur dengan melibatkan pihak Portugal, Indonesia dan Fretilin. Pada tahun 1987 terjadi kontak bilateral antara duta besar Indonesia dan Portugal di bawah koordinasi PBB yang menyepakati adanya kunjungan delegasi parlemen Portugal ke Timor Timur.

Pasca tragedi Santa Cruz, Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengeluarkan resolusi no 63/1997, yang isinya meminta Indonesia agar segera menghentikan terjadinya pelanggaran HAM di Timor Timur. Pelanggaran itu menyangkut soal adanya penyiksaan, pembunuhan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, pemindahan penduduk secara sistematis dan politik diskriminasi. Selain itu dibebaskannya warga Timor Timur yang ditahan atau dihukum karena alasan politis. Dijaminnya penghormatan HAM dan kebebasan dasar warga Timor Timur serta perlakuan manusiawi dan sesuai standar internasional pada badan peradilan di Timor Timur. Resolusi juga memutuskan diadakannya penyelidikan ulang atas tragedi Santa Cruz dan kebebasan bagi organisasi HAM untuk masuk ke Timor Timur.

Selain itu PBB juga menjadi mediator pelaksanaan dialog khusus antar kelompok masyarakat Timor Timur (AETD), dari tanggal 19-22 Maret 1996 di Burg Schlaining, Austria. Dalam Deklarasi Burg Schlaining 1996 dinyatakan perlunya menerapkan perlindungan hak asasi manusia dan rencana pembukaan pusat kebudayaan serta pembangunan sumber daya manusia Timor Timur. Komisi HAM PBB juga menugaskan stafnya sebagai pelapor khusus dan kelompok kerja, yang bekerja untuk mengawasi dan memonitor pelaksanaan HAM di Timor Timur.

Selama tahun 1996 pelapor khusus Komisi HAM PBB melaporkan masih terjadinya penyiksaan, intimidasi, penghilangan paksa, pelecehan seksual dan perkosaan terhadap wanita Timor Timur serta perlakuan sewenang-wenang tanpa proses hukum. Sejak 1994 sampai 1997, pelapor khusus dan kelompok kerja Komisi HAM PBB menemukan 378 kasus pelanggaran HAM yang belum diselesaikan pemerintah Indonesia. Jikapun ada respon, hal itu bersifat retorik dan kasus-kasus itu tetap gelap.** PBB tetap tidak berdaya sama sekali untuk memberlakukan resolusinya terhadap Indonesia. Karena itu sangat sedikit yang telah dilakukan masyarakat internasional untuk menjamin kepatuhan Indonesia kepada resolusi-resolusi PBB.

Saat ini upaya Sekjen PBB untuk membantu penyelesaian Timor Timur adalah dengan menunjuk Jamsheed

---

**. *Timor-Timur di Komisi HAM PBB*, 1997.

Marker (warga negara Pakistan) sebagai utusan pribadi Sekjen PBB. Marker datang pertama kali ke Timor Timur, 23 Maret 1997. Saat itu 250 orang pemuda Timor Timur mendatanginya dan memberi petisi kepadanya. Namun ke-datangan mereka dengan damai ini ternoda setelah petugas keamanan membubarkan mereka secara paksa. Pem-bubaran yang disertai penembakan itu mengakibatkan 4 orang pemuda terbunuh dan 20 orang luka parah. Karena masih banyaknya pelanggaran HAM inilah maka Komisi HAM PBB sampai sekarang masih terus mengagendakan masalah Timor Timur dalam setiap rapat komisi.

Selain PBB, Masyarakat Uni Eropa juga melakukan advokasi mengenai masalah Timor Timur. Saat buku ini diterbitkan, 5 orang delegasi Parlemen Uni Eropa sedang berkunjung ke Dili, 27-30 Juni 1998. Presiden Afrika Selatan yang juga tokoh pembebasan politik apartheid, Nelson Mandela juga bertemu dengan Xanana, ketika Mandela berkunjung ke Jakarta. Pertemuan ini dengan sendirinya membungkam propaganda aparat hukum dan departemen luar negeri Indonesia, yang selalu mengatakan bahwa Xanana dihukum karena kasus kriminal dan bukan politik. Kalau Xanana seorang kriminal bagaimana mungkin seorang tokoh sekaliber Nelson Mandela mau menemuinya.

Pasca tragedi Santa Cruz beberapa negara membatalkan kerjasamanya dengan Indonesia. Belanda, Denmark dan Kanada membatalkan bantuan dana proyek pembangunan kepada Indonesia. Sedang Inggris mengkaji ulang penjualan perlengkapan militernya kepada Indonesia. Amerika Serikat menghapus fasilitas pendanaan bagi pelatihan pendidikan militer internasional (IMET) senilai U$ 2,4 juta dan pembatalan penjualan senjata ringan untuk Indonesia. Sedang Australia adalah negara yang tidak berani bersikap tegas terhadap Indonesia. Australia justru menandatangani kerja sama dengan Indonesia untuk mengeksplorasi minyak di Celah Timor, yang bisa berproduksi 5 miliar barel minyak tiap tahunnya. ❍

VIII

Kunjungan Paus, Hadiah Nobel & Dukungan Organisasi HAM/LSM

SEJAK TAHUN 1983 PEMBICARAAN TIMOR Timur di sidang umum PBB ditangguhkan sampai akhir tahun 1991. Selama masa penangguhan itu, Paus Paulus Yohanes II sempat mengunjungi Timor Timur, Oktober 1989. Kunjungan Paus dari Vatikan ini berlangsung meriah dan Paus sempat melihat adanya aksi demonstrasi damai pemuda Timor Timur yang menuntut referendum di Timor Timur. Bagi Vatikan sampai sekarang belum mengakui integrasi Timor Timur. Sehingga keuskupan Dili langsung ditempatkan di bawah kewenangan Vatikan. Bukan di bawah Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI). Menurut Vatikan selama PBB belum mengakui integrasi Timor Timur maka Vatikan juga tetap bersikap yang sama dengan PBB. Pandangan Vatikan yang paling keras terhadap Indonesia terlontar ketika Paus Paulus Yohanes II mengung-kapkan keprihatinannya terhadap perkembangan agama dan budaya Timor Timur, yang disinyalir ingin dihapus oleh Indonesia.*

Setelah kunjungan Paus, parlemen Portugal mengumumkan pada tanggal 27 Oktober 1991, pembatalan kunjungannya, karena Indonesia keberatan dengan kehadiran wartawan Australia, Jill Joliffe, yang menurut Indonesia sangat bersimpati pada Fretilin dalam setiap tulisan yang dibuatnya. Pembatalan kunjungan ini membuat terjadinya kerusuhan antara pemuda yang pro dan anti integrasi di Dili, pada tanggal 28 Oktober 1991. Kedua kelompok pemuda ini telah membuat berbagai acara untuk menyambut kedatangan parlemen Portugal. Dalam kerusuhan di Gereja Motael, dua orang pemuda Timor Timur masing-masing yang anti dan yang pro integrasi, tewas akibat perkelahian.

---

*. The Jakarta Post, 17 Desember 1987.

Saat misa penaburan bunga kepada pemuda anti integrasi yang tewas itulah, kelompok Fretilin mengadakan aksi mimbar bebas di pekuburan Santa Cruz, Dili. Aksi inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Santa Cruz, 12 November 1991. Peristiwa yang terjadi persis di depan seorang utusan PBB yang sedang berkunjung ke Dili, membuat masalah Timor Timur kembali menjadi sorotan dunia dan agenda PBB. Banyaknya korban yang tewas, luka-luka dan hilang dalam peristiwa Santa Cruz, membuat masalah Timor Timur mencuat dalam dimensi baru yaitu masalah pelanggaran hak asasi manusia. Akibat Santa Cruz Indonesia dikutuk dan diprotes oleh berbagai negara dan lembaga masyarakat internasional.

Untuk memperingati peristiwa Santa Cruz, sejumlah aktivis hak asasi manusia dari berbagai negara dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional, berlayar dan melakukan tabur bunga ke perairan Timor Timur, November 1992. Dengan memakai kapal *Lusitania Expresso* yang berlayar dari Portugal ke Dili, aksi tabur bunga di-gagalkan oleh aparat Angkatan Laut Indonesia, yang meng-halau kapal tersebut ke luar dari perairan Indonesia. Jauh sebelum terjadi Santa Cruz, Uskup Belo pernah menulis surat kepada Sekjen PBB, yang isinya mendesak PBB mem-prakarsai adanya referendum di Timor Timur. Kutipan suratnya itu antara lain; "....*Sebagai rakyat dan sebagai suatu bangsa kami sedang sekarat*".

Penderitaan berkepanjangan yang dialami rakyat Timor Timur, rupanya mendapat simpati dan perhatian dunia internasional. 11 Oktober 1996, Komite Nobel di Oslo, Norwegia, memberikan penghargaan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Bapak spritual rakyat Timor Timur, Uskup Belo dan Jose Ramos Horta. Kedua tokoh itu menurut panitia Nobel telah mendedikasikan pikiran dan tenaganya untuk perjuangan dan perlindungan hak asasi manusia rakyat Timor Timur. Nobel ini dimaksudkan sebagai pen-dorong usaha untuk mendapatkan pemecahan diplomatik bagi konflik di Timor Timur yang berdasarkan pada hak-hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Pemberian Nobel ini menjadi tamparan keras bagi wajah diplomasi Indonesia. Dengan spontan Indonesia memprotes pem-berian Nobel kepada Ramos Horta. Sedangkan pemberian Nobel kepada Uskup Belo disambut dengan nada dingin. Pemberian Nobel ini menunjukkan kuatnya dukungan dunia internasional kepada perjuangan rakyat Timor Timur dan di sisi lain menunjukkan betapa lemahnya kampanye diplomasi luar negeri Indonesia.

Sementara itu peran organisasi HAM dan LSM internasional juga banyak memberikan laporan mengenai keadaan sebenarnya di Timor Timur. *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* adalah dua organisasi HAM internasional yang setiap tahun memberikan laporan lengkap mengenai kondisi HAM di Timor Timur. Kasus pelanggaran HAM sekecil apapun bisa terpantau oleh dua lembaga ini. Karena itu Komisi HAM PBB banyak mendapatkan data dari kedua lembaga independen ini. Menurut Amnesti Internasional selain ratusan orang Timor Timur yang tewas ditembak dan dianiaya, sampai sekarang tercatat ada 57 orang tahanan politik di Timor Timur serta beberapa orang ditahan di LP Cipinang Jakarta, termasuk Xanana Gusmao. Menurut Amnesti proses peradilan 57 orang ini tidak adil dan direkayasa.

Selain itu di berbagai negara muncul lembaga independen non pemerintah yang mengadvokasi dan peduli terhadap masalah Timor Timur. Lembaga yang bergerak pada advokasi HAM, sosial budaya, pembangunan dan demokratisasi antara lain: *East Timor Action Network* (ETAN), yang mempunyai cabang di seluruh negara bagian Amerika Serikat dan Kanada. *Action in Solidarity with Indonesia and East Timor* (ASIET), yang mempunyai perwakilan di seluruh kota besar di Australia. Lembaga *East Timor International Support Center* (ETISC), *Australians for a Free East Timor* dan *Student Supporters for East Timor*, yang semua-nya berpusat di Darwin Australia. *East Timor Independence Committee*, New Zealand (ETIC/Selandia Baru) dan *Australian Coalition for East Timor* (ACET).

Sedang di Eropa antara lain: *Committee of 100* (Finlandia), *Irlandia East Timor Solidarity* (Dublin), *Norwegia East Timor Solidarity* (Oslo), *Catholic Institute for International Relations* (London) dan *International Platform of Jurists for East Timor* (IPJET/Belanda). Di New York, Amerika Serikat juga berdiri *Parliamentarians for East Timor* (PET), yang merupakan organisasi parlemen internasional yang peduli terhadap masalah HAM dan demokratisasi di Timor Timur. Sementara di benua Asia, lembaga itu antara lain: *Free East Timor Japan Coalition* (Jepang), *Asia Pasific Coalition for East Timor* (APCET/Philippina), *Philippine Solidarity for East Timor and Indonesia* (PHIL-SETI/Philippina), *Korea East*

Timor Solidarity (KETS/Seoul), dan *Solidariti Timor Timur Malaysia* (STTM).

Kemudian *Taiwan Solidarity Group for East Timor* (Taipei), *Thailand Friends of East Timor* (TFET/Bangkok), *Friends of Third World* (Srilangka), *Asian Cultural Forum on Development* (ACFOD/Bangkok), *Initiatives for International dialogue* (IID/Philippina), Selain itu jaringan aksi solidaritas sejum-lah individu warga Timor Timur yang tinggal di berbagai negara, seperti; Makau, Mozambique, Angola, dll. Sedang di Indonesia yang aktif mengadvokasi masalah Timor Timur antara lain: PIJAR Indonesia (Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi), SPRIM (Solidaritas Rakyat Indonesia untuk Perjuangan Rakyat Maubere, Komite Bersama untuk Masyarakat Timor Timur (KBMTT), dan SOLIDAMOR (Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste).

Untuk kampanye masalah Timor Timur di dunia internasional versi organisasi non pemerintah, telah berlangsung beberapa kali pertemuan dan simposium. Antara lain: simposium di Oporto University Portugal, Leiden University Belanda, *Asia Pacific Coalition for East Timor* (APCET), dll. Dalam acara itu tidak hanya orang Timor Timur saja yang hadir tetapi juga aktivis Indonesia yang peduli terhadap nasib Timor Timur. Karena itu dalam pertemuan APCET II di Kuala Lumpur, 9-11 November 1996, 8 orang aktivis Indonesia yang hadir di sana, dideportasi oleh pemerintah Malaysia.

Selain itu pertemuan APCET II juga dibubarkan secara paksa oleh pemerintah Malaysia dan semua peserta dari luar negeri di deportasi. Sedang panitia APCET, aktivis LSM Malaysia sempat ditahan beberapa hari. Semua ini dilakukan Malaysia demi menjaga solidaritas ASEAN, walaupun sebenarnya menurut hukum setempat tindakan pembubaran itu telah melanggar hukum dan merusak citra Malaysia dalam pergaulan masyarakat internasional. Namun hal serupa juga dilakukan pemerintah Philippina yang melarang masuk Ramos Horta dalam pertemuan APCET I di Manila, tahun 1994. Dalam APCET III di Bangkok, 9 Maret 1998 bisa berlangsung penuh, walaupun sempat mendapat ancaman akan dibubarkan dari pemerintah Thailand, yang ditekan oleh Indonesia demi solidaritas ASEAN. Dalam pertemuan APCET III diputuskan APCET IV, akan berlangsung di Jakarta atau Dili. Banyak peserta APCET III yang terkejut, "Apa Mungkin?" tanya mereka ketika itu. "Mungkin saja!, sebab sekarang di Indonesia semuanya sudah berubah dengan cepat pasca jatuhnya Soeharto". ❍

IX

Masa Depan Timor Timur Pasca Rejim Soeharto

SEMANGAT REFORMASI DAN KEJATUHAN rejim Soeharto memberi inspirasi baru bagi rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebab masa depan Timor Timur ada di tangan mereka sendiri dan adalah hak asasi mereka untuk menentukan jalan terbaik apa yang menjadi keinginan mereka. Setelah 24 tahun berada dibawah kendali rejim Soeharto, maka saat inilah rakyat Timor Timur harus berani mengambil sikap terhadap masa depannya.

Saat ini sebenarnya berlaku tiga status politik untuk Timor Timur, yakni ***wilayah yang tak berpemerintahan***, ***wilayah yang diakui PBB berada dalam administrasi pemerintahan Portugal*** dan ***wilayah yang secara de facto berada dalam dominasi pemerintahan Indonesia***. Integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia selain tidak diakui oleh sebagian masyarakat Timor Timur, juga tidak diakui oleh PBB dan beberapa institusi serta negara anggota masyarakat internasional.

Karena itulah sampai sekarang masalah Timor Timur masih menjadi salah satu agenda PBB. Artinya walaupun integrasi dianggap Indonesia sudah final, namun bagi PBB dan masyarakat internasional hal itu masih bermasalah. Pasca kejatuhan Soeharto, Indonesia mencoba formula baru untuk menyelesaikan masalah Timor Timur. Dalam pertemuannya dengan Uskup Belo, penguasa politik Indonesia, Habibie menyatakan bersedia memberi status khusus kepada Timor Timur, yaitu otonomi yang diperluas.*

Tetapi belum jelas bagaimana substansi kongret dari otonomi yang diperluas itu, langsung tanpa *reserve*, Abilio Araujo -yang kebetulan bertemu Menlu Ali Alatas pada saat yang sama- menyatakan setuju dengan usulan itu. Abilio dulu adalah salah seorang tokoh Fretilin. Namun perjalanan waktu membuat Abilio menyeberang dan lebih dekat dengan politik kepentingan integrasi Indonesia. Hubungan Abilio sangat dekat dengan putri mantan pre-siden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut).** Kede-katan itu terbina melalui hubungan bisnis dagang dengan Tutut, yang saat ini hartanya digugat rakyat Indonesia karena berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Sementara itu Uskup Belo dengan diplomatis tidak mau langsung menjawab setuju atau tidak dengan usulan itu. Uskup kepada wartawan seusai diterima Habibie, menyatakan yang penting terlebih dulu adalah rakyat Timor Timur diberi kebebasan bergerak kemana saja dan mengangkat harkat martabatnya. Uskup menyatakan dengan tegas bahwa penarikan ABRI dari Timor Timur adalah salah satu hal yang penting agar rakyat Timor Timur babas dari trauma rasa takut. Selain itu upaya memperbaiki kehidupan rakyat dan dijaminnya pelaksanaan hak asasi manusia.***

Namun ironisnya apa yang diinginkan Uskup soal penarikan ABRI, justru sulit direalisasikan. Sebab menurut Menlu, Ali Alatas ada tiga bidang yang tidak akan dicakup dalam pembahasan otonomi, yakni politik luar negeri, per-

---

*. *Suara Pembaruan*, 25 Juni 1998.

**. *The Nation*, 23 Maret 1997.

***. *Suara Pembaruan*, 25 Juni 1998.

tahanan keamanan dan keuangan.**** Memang tidak diperjelas apa maksud pertahanan keamanan, namun dalam jumpa pers dengan wartawan di Dili, secara tegas Uskup menyatakan pendekatan keamanan di Timor Timur tidak relevan dalam semangat era reformasi. Uskup meminta agar jumlah pasukan militer Indonesia dikurangi dan mengubah status wilayah Timor Timur dari daerah operasi militer menjadi daerah normal.*****

Uskup juga menyatakan bahwa lembaga Indonesia yang berkompeten ikut menangani Timor Timur hanya Depar-temen Luar Negeri dan MPR/DPR. Karena itu ABRI tidak diperlukan sebab pendekatan penyelesaian masalah Timor Timur adalah dengan cara diplomasi bukan dengan pende-katan keamanan. Melalui peran yang paling berwenang, yaitu PBB, diperlukan mekanisme untuk menampung semua aspirasi rakyat Timor Timur, termasuk kaum gerilya Fretilin dan yang berada di luar negeri, ujar Uskup. Selain itu Uskup juga menyatakan agar pemerintah pusat meng-ijinkan pengajaran bahasa daerah Tetun di SD dan SMP, serta bahasa Portugis di SMU dan perguruan tinggi.****** Terakhir saat kedatangan anggota Parlemen Eropa di Dili, Uskup menyatakan bersedia menjadi mediator bagi perun-dingan para pihak yang pro dan anti integrasi. Dengan syarat semua pihak yang terlibat dalam perundingan tidak membawa-bawa nama Gereja dan Uskup.

Usaha untuk membentuk opini publik Timor Timur agar menyetujui ide status otonomi khusus langsung dikerjakan aparat Pemda dan ABRI di Timor Timur. Dengan

---

****. *Suara Pembaruan*, 24 Juni 1998.

*****. *Kompas*, 27 Juni 1998.

******. *Kompas*, 27 Juni 1998.

mengerahkan massa sekitar 1000 orang yang difasilitasi keberangkatannya dari 13 kabupaten di Timor Timur dan dukungan ribuan pegawai pemerintah dari kaum pendatang, digelar unjuk rasa pro otonomi di halaman kantor Gubernur Timor Timur. Menurut berita internet, *Apa Kabar*, edisi 28 Juni 1998, rakyat dipaksa oleh aparat kabupaten untuk berdemo pro otonomi di Dili dengan alasan bohong, bahwa mereka diajak untuk menyambut kedatang-an parlemen Eropa. Selain itu kepada mereka ada yang diberi uang lelah dan kebutuhan pokok.

Mereka juga diarahkan untuk berdemo di bandara Komoro, Dili untuk menyambut kedatangan 5 orang troika misi diplomatik (anggota parlemen) negara anggota Uni Eropa, 27 Juni 1998. Sementara yang menolak otonomi dan menginginkan referendum melakukan aksi damai dengan mahasiswa di kampus UNTIM, Dili. Namun aksi mereka ini direkayasa oleh sejumlah aparat dengan provo-kasi aksi di depan kantor Gubernur, yang mengakibatkan rusaknya beberapa kendaraan dan pelemparan gedung kantor Gubernur. Aksi ini dilakukan untuk menyudutkan kredibilitas nama baik para pemuda dan mahasiswa yang menolak otonomi.

Namun aksi-aksi itu akhirnya membawa korban. Manuel Marques tewas ditembak aparat ABRI saat berdemonstrasi menuntut referendum, di Baucau, 27 Juni 1998. Tewasnya Manuel membuat sekitar 50.000 orang masyarakat Dili marah dan berpawai sambil mengusung mayat mahasiswa Universitas Timor Timur ini. Pawai itu berakhir di depan kantor Gubernur yang menuntut adanya referendum segera, kemerdekaan nasional, penarikan segera tentara Indonesia, peletakan senjata milisi pribumi, perundingan segera di bawah pengawasan PBB, pembebasan Xanana dan semua tahanan politik lainnya, evakuasi para pegawai negeri Indonesia, pengunduran diri Gubernur Abilio, dan pembentukan komisi perdamaian internasional.

Ketika pawai massal itu berlangsung, Timor Timur seperti negara yang sudah merdeka. Sebab massa yang membawa bendera dan panji-panji Fretilin berteriak "Timor Timur Harus Merdeka" dan itu dilakukan secara bebas dan terbuka di depan tentara Indonesia yang berjaga-jaga saat pawai berlangsung. Ketika bertemu dengan anggota parlemen Uni Eropa, massa yang pro referendum itu langsung menyatakan berbagai tuntutannya. Antara lain agar Uni Eropa mengambil langkah menekan Indonesia agar mempercepat proses penyelesaian masalah Timor Timur. Bila perlu tekanan itu dengan menjatuhkan sangsi ekonomi dan penundaan bantuan IMF selama 6 bulan.

Sementara itu sebanyak 1000 orang pemuda dan mahasiswa Timor Timur yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera melakukan aksi unjuk rasa dan mimbar bebas di gedung Departemen Luar Negeri Jakarta, 5 Juni 1998. Aksi itu menolak otonomi dan menyerukan segera dilakukan referendum di Timor Timur serta dibebaskannya Xanana tanpa syarat. Namun aksi damai itu dibubarkan petugas dengan paksa. Sebanyak 10 orang luka-luka terkena pukulan pentungan petugas dan mereka dipulangkan dengan paksa ke berbagai kota.

Dalam pada itu ketika bertemu dengan fraksi ABRI DPR RI di Jakarta, 8 Juni 1998, Solidaritas Indonesia Untuk Perdamaian Timor Timur (SOLIDAMOR), menyatakan bahwa untuk penyelesaian tuntas masalah Timor Timur harus diserahkan kepada hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Timor Timur tanpa intervensi siapapun. Selain itu SOLIDAMOR menyatakan agar ABRI menghentikan operasi militer dan menarik diri dari Timor Timur. Kemudian pembebasan tanpa syarat Xanana

Gusmao dan pencabutan TAP MPR No. VII/1978 dan UU No. 7/1976, yang menyatakan Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. ❍

X

Xanana Gusmao, Ramos Horta & Portugal Menolak Otonomi

SEMENTARA ITU XANANA GUSMAO, RAMOS Horta dan pemerintah Portugal menanggapi usul otonomi khusus dengan sikap menolak. Menurut Xanana, ide otonomi khusus adalah upaya Indonesia untuk mengulur-ulur waktu agar bisa terus berkuasa di wilayah Timor Timur. Rakyat Timor-Timur sudah paham dengan taktik Indonesia itu dan mereka tidak mau lagi dibohongi. Sekaranglah saatnya bagi rakyat Timor-Timur untuk berani bersikap dan menyatakan penentuan nasib sendiri adalah prinsip dasar yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sedangkan Ramos Horta melihat usulan itu tidak mencerminkan sesuatu hal yang baru. Horta mengatakan Indonesia tidak serius untuk menyelesaikan masalah Timor Timur. Buktinya Indonesia tidak mau membebaskan Xanana dengan alasan Xanana dihukum karena kasus kriminal. Padahal Xanana dihukum karena berjuang untuk kebebasan negerinya dan perjuangannya itu diakui oleh masyarakat internasional dan PBB. Sebagai buktinya, PBB dan Uskup Belo sendiri menyatakan untuk menyelesaikan masalah Timor Timur juga harus menyertakan kehadiran Xanana dalam perundingan dialog yang adil dan egaliter. Bagaimana Xanana bisa hadir berunding jika dia masih ditahan oleh pemerintah Indonesia, ujar Ramos Horta ketika diwawancarai media *The Australian*, 30 Juni 1998.

Dalam tulisannya di media *International Herald Tribune*, Ramos Horta mengatakan dia akan siap-siap terbang ke Jakarta untuk bekerjasama dengan Xanana guna menjelaskan aspirasi rakyat Timor Timur kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Menurut dia waktunya telah tiba untuk mengadakan referendum yang disponsori PBB. Rakyat Timor Timur akan turun ke jalan bila kesabaran dan toleransi mereka tidak ditanggapi. Timor Timur merupakan suatu ujian moral bagi Indonesia untuk dapat merengkuh kembali kepercayaan internasional, tambah Horta.

Sementara itu pemerintah Portugal juga menyambut dingin usulan otonomi dan belum memberikan jawaban untuk berunding secara tripartit dengan Indonesia dibawah naungan Sekjen PBB. Menurut Portugal formulasi referendum adalah pilihan yang paling demokratis dan independen bagi rakyat Timor Timur. Selama ini referendum yang jujur dan adil dibawah pengawasan PBB belum pernah dilakukan di Timor Timur. Jika Indonesia selalu menolak referendum berarti Indonesia memang meragukan integritas dan legitimasi integrasi dalam kondisi rakyat Timor Timur saat ini, yang sudah berani bersikap dan berpikir kritis.*

Sementara itu pasca jatuhnya rejim Soeharto, belum ada tanda-tanda keinginan pemerintah Indonesia untuk membebaskan Xanana Gusmao. Menlu Indonesia menyatakan bersedia membebaskan Xanana dalam rangka atau sebagai bagian dari penyelesaian akhir dan bukan sebagai suatu pra kondisi untuk penyelesaian akhir. Arti dari per-

---

*. *Portuguese News Agency*/LUSA, 29 Juni 1998.

nyataan Menlu adalah selama Xanana, Ramos Horta dan Portugal menolak integrasi dan otonomi maka selama itu pula Xanana tidak akan dibebaskan.

Sementara itu Xanana sendiri menyatakan bahwa referendum di bawah pengawasan PBB harus segera dilakukan di Timor Timur. Sekeras apapun Indonesia menentang referendum, perlawanan dari rakyat Timor Timur terus akan berlangsung. "Untuk rakyat Maubere (Timor Timur), hidupnya sudah ditetapkan. Tidak ada, dan tidak akan ada alternatif lainnya. *Patria ou Morte* (tanah air atau mati), akan terus menjadi teriakan tiap hati rakyat Maubere," ujar Xanana dengan nada tegas.

Menghadapi tekanan internasional dan rakyat Timor Timur yang semakin kuat untuk referendum, pemerintah Indonesia terlihat bersikap defensif. Menlu Ali Alatas ketika ditanya wartawan tetap mengatakan bahwa otonomi yang diperluas adalah kebijakan yang paling tepat buat Timor Timur. Dengan alasan bahwa referendum bisa mem-buat perpecahan yang tajam dalam rakyat Timor Timur dan kemampuan ekonominya yang terbatas, Ali Alatas berusaha membuat Indonesia tidak kehilangan muka. Padahal kalau soal kemampuan ekonomi, Indonesia juga di awal kemerdekaan dengan keadaan ekonomi yang morat-marit. Sekarang dengan bantuan lembaga keuangan dunia IMF, Uni Eropa, Bank Dunia, PBB, Amerika, dll Timor Timur bisa punya modal awal untuk merdeka dan mandiri, ujar aktivis pemuda IMPETTU.

Selain itu sejumlah pengamat politik Indonesia menyatakan Indonesia seharusnya memusatkan konsentrasinya pada banyak masalah substansial internal dalam negeri yang saat ini membutuhkan solusi yang pas dan cepat. Kalau Indonesia masih tetap ngotot dalam masalah Timor Timur, maka konsentrasi Indonesia untuk menyelesaikan masalah internal yang pokok dan jauh lebih penting, bisa pecah dan buyar.

Selain itu menurut anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Marzuki Darusman, mengatakan sudah terlampau banyak dana dan upaya yang dikerahkan Indonesia untuk Timor Timur. Dana untuk biaya operasi militer dan ongkos politik pembangunan yang bermiliar-miliar rupiah untuk Timor Timur, sudah saatnya dialihkan kepada bidang lain yang saat ini sangat membutuhkan. "Kan lebih baik dan tepat semua biaya itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat yang sekarang terancam kelaparan," ujar Marzuki.

Refleksi dari semua hal tersebut di atas adalah sudah tiba saatnya rakyat Timor Timur untuk diberi kesempatan bersuara menyampaikan aspirasi dan prakarsanya dalam menyelesaikan masalah Timor Timur serta dihargai hak kedaulatan dan martabat setiap rakyatnya. Sebab dengan jujur harus kita akui bahwa selama ini orang Timor Timur tidak pernah diberi kebebasan dan kesepakatan untuk memilih dan menentukan pilihan politik yang terbaik bagi dirinya sebagai sublimasi dari setiap dan semua aspirasi otentik, berdasarkan kesadaran dan independensinya, termasuk tahu dan mau serta berani menanggung apapun konsekwensi dari pilihannya.

A LUTA CONTINUA

○○○

Daftar Pustaka

Buku:

Aboeprijadi Santoso, *Jejak-jejak Darah*, PIJAR Yogyakarta, 1996.

Aditjondro, George J., *In The Shadow of Mount Ramelau, The Impact of The Occupation of East Timor*, The Netherlands, 1994.

Barbedo de Magelhaes, *East Timor: Land of Hope*, Lisbon, 1994.

Budiardjo, Carmel & Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, London, 1984.

Carey P. & G.C. Bentley, *East Timor at the Crossroads, The Forging of A Nation*, New York, 1995.

Defert Gabriel, *Timor Est, Le Genocide Oublie, Droit d'un Peuple et Raisons d'Etats*, Paris, 1992.

PBB, *Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia Mengenai Timor Timur*, 1996-1997.

Imagining East Timor, *Arena*, no 4, Melbourne, 1993.

Initiatives For International Dialogue, *East Timor For Beginners*, Filippina, 1997.

Joao Mariano Saldanha, *Ekonomi Politik Pembangunan Timor Timur*, Jakarta, 1994.

Jolliffe, J, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, St Lucia, Quennsland, 1978

Mc Millan, Andrew, *Death in Dili*, Australia 1992.
Ramos Horta, Jose, Funu, *The Unfinished Saga of East Timor*, New York, 1987.
Siregar, M, *Tragedi Manusia dan Kemanusiaan*, Amsterdam, 1995.
Salim, Paul, *The Untold Story of East Timor*, Internet, Apa Kabar, 1996.
Taylor, JG, *Indonesia's Forgotten War: The Hidden History of East Timor*, London, 1991.

Mass Media:

Kompas, Suara Pembaruan, International Herald Tribune, The Australian, dll.

Solidaritas untuk Penyelesaian damai Timor Leste (SOLIDAMOR) adalah organisasi advokasi, informasi dan aksi yang bersifat independen dan peduli pada masalah dan nasib Timor Timur. SOLIDAMOR menghimpun semua anggota orang Indonesia dari berbagai profesi dan latar belakang yang sangat beragam.

Bidang pekerjaan antara lain:

- Membangun kepedulian publik, *support* serta kampanye terhadap masalah Timor Timur.
- Menganalisa dan membentuk jaringan kerja advokasi, aksi dan informasi mengenai masalah Timor Timur.
- Memproduksi bulletin, buku, film, brosur dan dokumen lainnya mengenai semua aspek masalah Timor Timur.
- Membangun solidaritas dan kerja sama dengan lembaga-lembaga advokasi hak asasi manusia dan demokratisasi.
- Pendampingan terhadap rakyat Timor Timur yang membutuhkan bantuan advokasi sosial publik dan non advokasi.
- *Support* terhadap hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri.
- *Fund Rising* untuk membantu rakyat Timor Timur.

Jika anda tertarik ingin bergabung dan ingin lebih tahu secara detail mengenai Timor Timur, seperti:

- Ingin mendukung advokasi hak asasi manusia, demokratisasi dan penentuan nasib sendiri.
- Tertarik untuk memberi solusi mengenai masalah Timor Timur.
- Ingin lebih tahu dan mengenai semua aspek Timor Timur.
- Ingin menerima terbitan dan dokumen lain mengenai Timor Timur.
- Ingin hadir dalam acara-acara seperti pertemuan budaya, diskusi, seni, dll mengenai Timor Timur.
- Ingin berkenalan dan membina hubungan pertemanan dengan rakyat Timor Timur.
- Ingin memberi donatur kepada kegiatan advokasi dan bantuan langsung kepada rakyat Timor Timur.

Maka kepada anda yang tertarik harap mengisi dan mengirimkan data di bawah ini:

Nama : ____________________

Umur : ____________________

Alamat : ____________________

Telpon/fax kantor/rumah : ____________________

Email : ____________________

Pekerjaan : ____________________

kepada **SOLIDAMOR:**

Jl. Pramuka Jaya Sari No. 9A Jakarta 10570, Indonesia
Tel/Fax: (021) 4224079 email: solidmor@centrin.net.id

- ✂

TIMOR TIMUR telah menjadi suatu metafora bagi bencana yang beranak cucu. Serbuan tentara Indonesia 7 Desember 1975 dan pendudukan militer yang terus berlangsung, merupakan bencana kemanusiaan. Rekayasa Integrasi dengan Indonesia telah mengorbankan ratusan ribu jiwa. Kebanyakan korban itu rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa. Juga tewas ribuan prajurit Indonesia. Tragedi itu merupakan bencana politik yang merugikan semua pihak, Timor Timur dan Indonesia.

NANA
GUSM
MBO
DE UN
NA

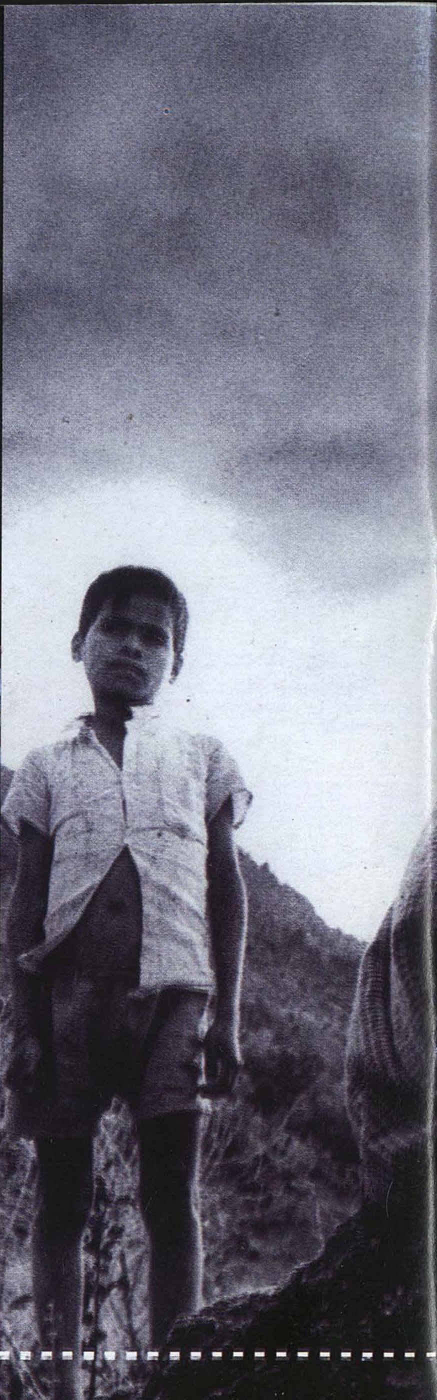

Solidamor

Sebuah lembaga yang menghimpun unsur rakyat Indonesia dari berbagai profesi dan latar belakang yang berbeda, tetapi peduli pada persoalan dan masa depan Timor Timur.